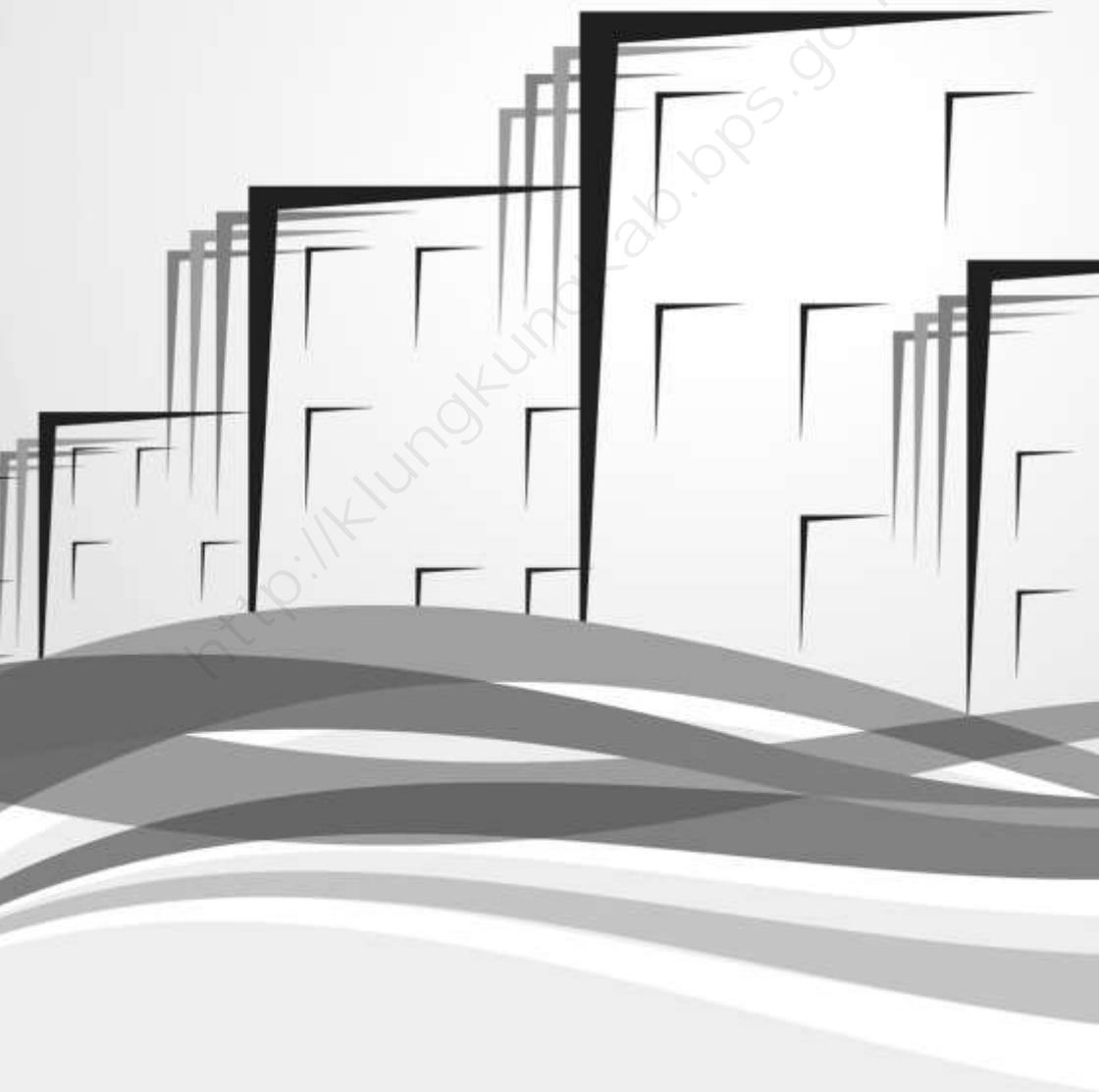


STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KLUNGKUNG 2015



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KLUNGKUNG**

STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KLUNGKUNG 2015



**STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN KLUNGKUNG 2015**

ISBN. : **978-602-6840-15-8**

No. Publikasi : 51050.1615

Katalog BPS : 4101002.5105

Ukuran Buku : 148 x 210 mm

Jumlah Halaman : xvi + 113 halaman

Naskah : Seksi Statistik Sosial

Gambar Kulit : Seksi IPDS

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung

Jalan Raya Besakih, Akah, Semarapura, Klungkung

Telp. (0366) 21180 Fax. (0366) 24242

E-mail : bps5105@bps.go.id

Dicetak Oleh :

Percetakan Bali

Jalan Gajah Mada I No 1 Denpasar

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Penyusunan publikasi dengan judul “Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung 2015” merupakan publikasi ketiga di bidang kesejahteraan rakyat yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Klungkung. Publikasi ini secara umum memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung tahun 2015.

Beberapa indikator yang dibahas didalamnya antara lain kependudukan, kesehatan, pendidikan, perumahan, konsumsi rumah tangga dan pembangunan manusia. Dengan diterbitkannya publikasi ini, diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi, perencanaan, dan pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Klungkung.

Meskipun publikasi ini telah disiapkan dengan sebaik-baiknya, disadari masih terdapat kelemahan dalam analisa data. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca dan pengguna data merupakan evaluasi untuk penyempurnaan publikasi mendatang dan semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, Oktober 2016
Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung
Kepala,

Ir.A.A.A. Raka Suarningsih
NIP. 19660710 199203 2 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
Bab 1 Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Sumber Data	6
1.4 Sistematika Penulisan	11
Bab 2 Metodologi	11
2.1 Ruang Lingkup	11
2.2 Jenis Data yang dikumpulkan	11
2.3 Metode Pengumpulan Data	12
2.4 Pengolahan Data	13
Bab 3 Konsep dan Definisi	17
3.1 Kependudukan	17

3.2	Kesehatan	19
3.3	Pendidikan	20
3.4	Perumahan	21
3.5	Konsumsi Rumah Tangga	24
3.6	Indeks Pembangunan Manusia	24
3.7	Kemiskinan	25
Bab 4	Kependudukan	29
4.1	Kepadatan Penduduk	29
4.2	Komposisi Penduduk	30
4.3	Perkembangan Penduduk	35
Bab 5	Kesehatan	39
5.1	Taraf Kesehatan Masyarakat	39
5.2	Kesehatan Anak	43
5.3	Keluarga Berencana	49
5.4	Kebiasaan Hidup Sehat	52
Bab 6	Pendidikan	57
6.1	Angka Melek Huruf	58
6.2	Tingkat Partisipasi Sekolah	60

	6.2.1	Angka Partisipasi Sekolah	60
	6.2.2	Angka Partisipasi Murni	63
	6.2.3	Angka Partisipasi Kasar	65
	6.3	Tingkat Pendidikan Tinggi yang ditamatkan	67
Bab 7		Perumahan	73
	7.1	Fasilitas Bangunan Tempat Tinggal	73
	7.2	Fasilitas Air Minum	80
	7.3	Fasilitas Buang Air Besar	83
	7.4	Bahan Bakar untuk Memasak	85
	7.5	Sumber Penerangan	86
Bab 8		Konsumsi Rumah Tangga	91
	8.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	91
	8.2	Jenis Pengeluaran	92
Bab 9		Indeks Pembangunan Manusia	96
	9.1	Indikator Kesehatan	98
	9.2	Indikator Pendidikan	99
	9.2.1	Harapan Lama Sekolah	100
	9.2.2	Rata—Rata Lama Sekolah	101

9.3	Indikator Pendapatan	102
9.4	Indeks Pembangunan Manusia	104
Bab 10	Kemiskinan	109
10.1	Indikator Kemiskinan	110
10.2	Distribusi Pendapatan	111

<http://klungkungkab.bps.go.id>



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Kepadatan Penduduk Kabupaten Klungkung, 2015	29
Tabel 4.2	Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Klungkung, 2015	31
Tabel 4.3	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Klungkung, 2015	34
Tabel 4.4	Perkembangan Kependudukan Kabupaten Klungkung, 2012— 2015	36
Tabel 5.1	Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Ke- lamin, 2015	40
Tabel 5.2	Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Jenis Imunisasi Kabupaten Klungkung, 2012 – 2015	44
Tabel 6.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Usia Sekolah di Kabupaten Klungkung, 2011— 2015	61
Tabel 6.2	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten KLungkung, 2011—2015	64
Tabel 6.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klungkung, 2011—2015	66
Tabel 6.4	Penduduk 15 Tahun Ke Atas menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Klungkung, 2011— 2015	67
Tabel 9.1	Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2011— 2015	99
Tabel 9.2	Harapan Lama Sekolah penduduk usia 7 Tahun Ke atas di Kabupaten Klungkung, 2011— 2015	100

Tabel 9.3	Rata—Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas di Kabupaten Klungkung, 2011—2015	101
Tabel 9.4	Rata—Rata Pengeluaran yang Disesuaikan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2011— 2015	103
Tabel 9.5	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2011— 2015	104
Tabel 10.1	Indikator Kemiskinan Kabupaten Klungkung, 2014— 2015	110
Tabel 10.2	Distribusi Pendapatan Kabupaten Klungkung, 2015	113
Tabel 10.3	Gini Ratio Kabupaten Klungkung, 2015	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Piramida Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2015	33
Gambar 5.1	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kabupaten Klungkung Tahun 2015	40
Gambar 5.2	Persentase Penduduk menurut Cara Berobat di Kabupaten Klungkung Tahun 2015	41
Gambar 5.3	Persentase Penduduk Kabupaten Klungkung yang Berobat Jalan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2015	42
Gambar 5.4	Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah diberi ASI Kabupaten Klungkung Tahun 2015	43
Gambar 5.5	Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Jenis Kelamin Tahun 2015	45
Gambar 5.6	Persentase Perempuan Berumur 15—49 Tahun yang Pernah Kawin dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Tahun 2015	47
Gambar 5.7	Persentase Perempuan Berumur 15—49 Tahun yang Pernah Kawin dan Penolong Proses Ke- lahiran Terakhir Tahun 2015	48
Gambar 5.8	Persentase Perempuan yang Pernah Kawin berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2015	50
Gambar 5.9	Persentase Perempuan Berumur 15—49 Tahun Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/ Cara KB Menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan Tahun 2015	51

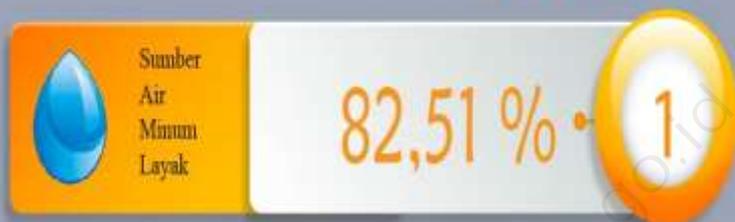
Gambar 5.10	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir Menurut Kebiasaan Merokok Tahun 2015 ..	53
Gambar 5.11	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir Menurut Jumlah Batang Rokok yang Di-hisap per Minggu Tahun 2015	54
Gambar 6.1	Persentase Angka Melek Huruf Kabupaten Klungkung Tahun 2013—2015	59
Gambar 6.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2015	62
Gambar 6.3	Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015	68
Gambar 7.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Klungkung Tahun 2015	74
Gambar 7.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Klungkung Tahun 2015	76
Gambar 7.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Klungkung Tahun 2015	78
Gambar 7.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Klungkung Tahun 2015	78
Gambar 7.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Klungkung Tahun 2015	79

Gambar 7.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Air Minum Kabupaten Klungkung tahun 2015	80
Gambar 7.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum Utama ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Kabupaten Klungkung Tahun 2015	82
Gambar 7.8	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Kabupaten Klungkung Tahun 2015	83
Gambar 7.9	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Kabupaten Klungkung Tahun 2015	84
Gambar 7.10	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama yang Digunakan untuk Memasak Kabupaten Klungkung Tahun 2015	86
Gambar 7.11	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Utama Penerangan Kabupaten Klungkung Tahun 2015	87
Gambar 8.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2015	91
Gambar 8.2	Persentase Rata—rata Konsumsi per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Klungkung Tahun 2015	93

<http://klungkungkab.bps.go.id>



INDIKATOR KESEJAHTERAAN



1.1 Latar Belakang

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan tujuan utama pembangunan. Usaha-usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sekaligus bersamaan dengan mengarahkan segala daya untuk meletakkan landasan yang kuat agar pembangunan pada tahap berikutnya dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Strategi pembangunan bukan hanya ditekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga pemerataan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai tingkat pemerataan diperlukan informasi tentang tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan tidak terlepas dari kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi. Ketiga kegiatan ini terkait langsung dengan keberadaan data atau informasi yang relevan sehingga dapat digunakan sebagai instrumen dalam melaksanakan perencanaan, monitoring atau evaluasi. Proses pembangunan semacam ini merupakan suatu usaha jangka panjang yang memerlukan data penunjang. Data yang diperlukan dengan sendirinya haruslah mempunyai beberapa persyaratan yang erat kaitannya dengan pembangunan itu sendiri, dapat disajikan tepat pada waktu diperlukan dan mampu mencerminkan hal-hal yang benar terhadap gejala (fenomena) yang sedang terjadi. Oleh karena kebutuhan yang sifatnya terus menerus dan dalam segala bidang, maka pembangunan perlu dibarengi juga dengan menyempurnakan dan mengembangkan data statistik yang ada. Pada hakekatnya pembangunan manusia seutuhnya seperti yang digariskan tidak dapat di laksanakan secara terpisah-pisah. Usaha pembangunan dalam satu bidang harus selaras dan seimbang

PENDAHULUAN

dengan usaha pembangunan bidang lain, yang mencakup berbagai segi dan dimensi.

Salah satu data atau informasi yang dapat dipergunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan adalah indikator kesejahteraan rakyat karena banyak informasi yang menyatakan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai target sasaran pembangunan. Kebutuhan data indikator kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan saat ini dirasakan sudah sangat mendesak terutama untuk keperluan perencanaan pembangunan dan bahan untuk evaluasi pencapaian program. Mengingat tujuan utama pembangunan umumnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan ini berarti membangun seluruh lapisan masyarakat terutama yang menyangkut aspek kebutuhan hidup, seperti makan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, keamanan, hiburan, status sosial dan kesempatan kerja. Dalam usaha mempercepat terpenuhinya kebutuhan tersebut pemerintah telah mencanangkan berbagai program di bidang-bidang yang strategis misalnya kesehatan, pendidikan dan perumahan. Guna menopang perencanaan pembangunan tersebut, kebutuhan data sosial, khususnya mengenai tingkat kesejahteraan rakyat perlu dipenuhi untuk mengetahui apakah hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat, terutama yang menyangkut berbagai aspek kebutuhan hidup seperti disebutkan di atas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan publikasi ini adalah untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan, baik berfungsi sebagai subyek maupun objek pembangunan yang meliputi gambaran umum penduduk, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Secara spesifik, tujuan penyusunan publikasi ini antara lain :

1. Memberikan gambaran umum tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung
2. Untuk mengukur sudah sejauh mana pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati masyarakat Kabupaten Klungkung
3. Membantu pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dilihat dari indikator kesejahteraan rakyat.

1.3 Sumber Data

Data yang tersaji dalam publikasi ini merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2015 yang pelaksanaannya serentak di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangannya dilihat dalam tiga tahun terakhir sebagai perbandingan yaitu Susenas Tahun 2013, Susenas Tahun 2014 dan Susenas Tahun 2015.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan publikasi ini dibagi menjadi 10 (sepuluh) bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB 2 KONSEP DAN DEFINISI

Berisi konsep dan definisi mengenai kependudukan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan konsumsi rumah tangga.

BAB 3 METODOLOGI

Berisi metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data kesejahteraan rakyat.

BAB 4 KEPENDUDUKAN

Berisi analisis deskriptif mengenai keadaan demografis penduduk yang dirinci menurut kepadatan penduduk, rasio ketergantungan, piramida penduduk, dan sex rasio.

BAB 5 KESEHATAN

Berisi analisis deskriptif mengenai angka harapan hidup, keluhan kesehatan, cara berobat, penolong kelahiran, pemberian ASI, imunisasi, usia perkawinan pertama dan keluarga berencana.

BAB 6 PENDIDIKAN

Berisi analisis deskriptif mengenai tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angka melek huruf, dan angka partisipasi sekolah.

BAB 7 PERUMAHAN

Berisi analisis deskriptif mengenai status penguasaan tempat tinggal, luas lantai, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, fasilitas air minum, jarak sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan tempat pembuangan akhir tinja.

BAB 8 KONSUMSI RUMAH TANGGA

Berisi analisis deskriptif mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga dan jenis rumah tangga.

BAB 9 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Berisi analisis deskriptif mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta perbandingan IPM antar kabupaten.

BAB 10 KEMISKINAN

Berisi tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan serta garis kemiskinan.

<http://klungkungkab.bps.go.id>

Metodologi

300.000 ruta sampel dan
75.000 ruta sampel

Maret dan
September

A

Demografi,
Pendidikan,
Kesehatan,
Perumahan,
Pendapatan



Wawancara langsung
dengan rumah tangga
sampel

B



Editing, Coding,
Validasi Data

Tabulasi
Data

C

2.1 Ruang Lingkup

Data pendukung utama dalam penyusunan Statistik Kesejahteraan Rakyat diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas merupakan salah satu survei yang mempunyai cakupan data sosial paling lengkap dan luas serta merupakan sumber data terbanyak yang digunakan dalam penyusunan Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Susenas 2015 dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Pada bulan Maret, pengumpulan data Susenas mencakup 300.000 rumah tangga sampel yang tersebar 34 Provinsi dan 511 Kabupaten/Kota di Indonesia. Sementara itu, pengumpulan data Susenas pada bulan September mencakup 75.000 sampel rumah tangga.

2.2 Jenis Data yang Dikumpulkan

Jenis Data yang dikumpulkan dengan dalam Susenas 2015 mencakup :

1. Keterangan demografi, akte kelahiran, dan pendidikan anak usia dini (PAUD);
2. Keterangan pendidikan anggota ruta berumur 5 tahun ke atas;
3. Keterangan bepergian dan korban kejahatan;
4. Keterangan keluhan, rawat jalan, dan jaminan kesehatan;
5. Keterangan rawat inap dan merokok;
6. Keterangan keberadaan ibu kandung di dalam rumah tangga, tempat lahir, tempat tinggal 5 tahun yang lalu

- dan nomor induk kependudukan (NIK);
7. Keterangan tentang balita, yaitu imunisasi untuk balita dan ASI untuk baduta;
 8. Keterangan teknologi informasi dan komunikasi anggota ruta berumur 5 tahun ke atas;
 9. Keterangan ketenagakerjaan anggota ruta berumur 10 tahun ke atas;
 10. Keterangan fertilitas, penolong persalinan, dan keluarga berencana untuk perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun;
 11. Keterangan perumahan;
 12. Keterangan perlindungan sosial;
 13. Keterangan kepemilikan barang dan sumber penghasilan ruta;
 14. Keterangan tentang kuantitas dan nilai konsumsi/ pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau seminggu yang lalu;
 15. Keterangan tentang pengeluaran bukan makanan selama sebulan dan setahun terakhir;
 16. Keterangan tentang pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran bukan konsumsi selama setahun terakhir.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Secara garis besar, kegiatan lapangan Susenas 2015 mencakup kegiatan pemutakhiran bangunan fisik dan rumah tangga, pemilihan

rumah tangga sampel, pencacahan rumah tangga sampel, pengawasan dan pemeriksaan. Pencacahan atau pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan responden terpilih yang dilakukan oleh petugas survei. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner Susenas 2015 yang ditujukan kepada individu perlu diusahakan agar individu yang bersangkutan yang diwawancarai. Keterangan dalam rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik yang ditanyakan.

2.4 Pengolahan Data

Pengolahan data, mulai dari tahap perekaman data (data entri), pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner (*validation*) sampai dengan tahap tabulasi, sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan cek awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, pemberian kode (*coding*), penyuntingan (*editing*) terhadap isian yang tidak wajar, termasuk hubungan keterkaitan (konsistensi) antara satu jawaban dengan jawaban yang lain.

<http://klungkungkab.bps.go.id>

Konsep & Definisi

Gini Ratio



Ukuran
Ketimpangan /
Ketidakmerataan

Garis Kemiskinan



Batas minimum
yang diperlukan
untuk memenuhi
kebutuhan dasar
manusia

Rumah Tangga

sekelompok orang yang
tinggal bersama dan
makan dari satu dapur



Distribusi Pendapatan



Ketimpangan
ketidakerataan
penyagian hasil
produksi/ jasa dalam
di kalangan penduduk

IMUNISASI

Memasukkan kuman penyakit
yang sudah dimatikan
ke dalam tubuh



IPM

Mengukur pencapaian
hasil pembangunan
dari suatu
daerah/wilayah



3.1 Kependudukan

Rumah Tangga dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus.

1. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu. Selain rumah tangga biasa yang terdiri dari bapak, ibu dan anak, yang juga dianggap sebagai rumah tangga biasa antara lain :
 - Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makannya secara sendiri.
 - Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam (sub) blok sensus yang sama dianggap satu rumah tangga.
 - Pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai anggota rumah tangga induk semangnya.
 - Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.
2. Rumah tangga khusus (tidak dicakup dalam Susenas), yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi (asrama TNI), panti asuhan, lembaga permasyarakatan, rumah tahanan, sekelompok

orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih,

Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada saat pencacahan maupun tidak ada. . Orang yang telah tinggal di suatu rumah tangga 6 bulan atau lebih atau telah tinggal di suatu rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap di rumah tangga tersebut dianggap sebagai anggota rumah tangga. Sedangkan anggota rumah tangga yang bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan atau bertujuan pindah akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Kepala Rumah Tangga adalah seorang dari kelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut.

Kawin adalah mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (agama, adat, negara, dsb), tetapi mereka yang hidup bersama pada saat pencacahan, dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami-istri.

Cerai Hidup adalah berpisah sebagai suami/istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk

mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggal oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil dianggap cerai hidup.

Cerai Mati adalah ditinggal mati oleh istri/suaminya dan belum kawin lagi.

3.2 Kesehatan

Keluhan Kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau hal-hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada periode survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Imunisasi adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh anak balita dengan cara suntik atau minum, dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu pada tubuh.

Penolong Kelahiran adalah penolong pertama saat proses kelahiran anak dan penolong terakhir saat proses kelahiran. Seorang ibu yang melahirkan bisa ditolong oleh lebih dari satu jenis penolong kelahiran. Dimana proses kelahiran adalah proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia dimulai dari tanda-tanda kelahiran hingga lahirnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluarnya plasenta.

Anak Lahir Hidup adalah anak yang pada waktu dilahirkan

menunjukkan tanda-tanda kehidupan walaupun mungkin hanya beberapa saat saja seperti jantung berdenyut, bernafas dan menangis. Anak yang pada waktu lahir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan disebut lahir mati.

Pemberian Asi adalah memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi baik secara langsung (menyusui) maupun melalui alat bantu seperti botol, gelas, sendok dan lain-lain. Bayi dianggap diberi ASI saja meskipun dia diberi obat, vitamin (walaupun ditambah air putih untuk meminumnya).

3.3 Pendidikan

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

Tidak/Belum Pernah Sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke SD.

Masih Bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Tidak Bersekolah Lagi adalah mereka yang pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah mereka yang menyelesaikan tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan

tanda tamat/ijazah. Atau jenjang pendidikan yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

3.4 Perumahan

Luas Lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung)

Dinding adalah sisi luar /batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumahtangga atau bangunan lain.

Atap adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

Rumah Milik Sendiri, jika tempat tinggal tersebut saat pencacahan sudah milik kepala atau anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri

Rumah Kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala atau anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai.

Rumah Sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala

atau anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

Rumah bebas sewa milik orang lain, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan family/orang tua) dan ditempati oleh rumah tangga responden tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun .

Rumah bebas sewa milik orang tua/saudara, jika tempat tinggal tersebut milik saudara/orang tua dan ditempati oleh rumah tangga responden tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun, dimana saudara/orang tua tidak tinggal di rumah tersebut atau bukan anggota rumah tangga.

Rumah Dinas, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi atau perusahaan tempat bekerja kepala atau anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak.

Air Kemasan adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol

Air Leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM. (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/ Badan Pengelola Air Minum)

Pompa adalah jenis sumber air yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan / pompa listrik.

Air Sumur Terlindung adalah jenis sumber air yang berasal dari dalam tanah yang digali, cara pengambilannya dengan menggunakan

gayung atau ember baik dengan atau tanpa katrol dan lingkaran mulut sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit setinggi 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan disekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut sumur/perigi.

Sumur Tak Terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut tidak dilindungi oleh tembok dan lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur

Mata Air Terlindung adalah sumber air permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya dan terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci atau lainnya.

Mata Air Tak Terlindung adalah sumber air permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya dan tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci atau lainnya.

Tangki/SPAL adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton baik mempunyai bak resapan maupun tidak, termasuk disini daerah pemukiman yang mempunyai Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) terpadu yang dikelola pemerintah kota.

Listrik non PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu, generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

3.5 Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga adalah semua biaya yang dikeluarkan rumah tangga selama sebulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi semua anggota rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan, mencakup semua barang dan jasa yang dikonsumsi tanpa melihat asalnya tetapi terbatas hanya barang dan jasa untuk kebutuhan rumah tangga saja, artinya tidak termasuk konsumsi atau pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran rata-rata perkapita/bulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

3.6 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak.

Distribusi Pendapatan adalah ketimpangan atau ketidakmerataan pembagian hasil pembangunan suatu Negara di kalangan penduduknya.

Gini Ratio (Koefisien Gini) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga 1

(ketimpangan yang sempurna).

3.7 Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) adalah ukuran kemiskinan yang memperhitungkan ketimpangan atau kesenjangan diantara penduduk miskin.

<http://klungkungkab.bps.go.id>

PENDUDUK KLUNGKUNG

Secara rata-rata tiap
1 km² wilayah di
Klungkung didiami
oleh
558
orang
penduduk

Jumlah
175,7
(ribu jiwa)

Kepadatan
557,78
(jiwa per km²)

Pertumbuhan
0,51%

Jumlah
penduduk
bertambah
0,51% dari
tahun 2014

Setiap 100 orang
penduduk perempuan
terdapat 98 penduduk laki-laki

Sex Ratio
97,86%

Dependency Ratio
52,12%

Setiap 100 orang usia
produktif menanggung 52
orang usia tidak produktif

Rata-rata
Anggota Ruta
4 (jiwa)

Jumlah
Rumahtangga
43,92
(ribu ruta)

2015



4.1 Kepadatan Penduduk

Kependudukan merupakan suatu permasalahan yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan yang mencakup antara lain mengenai jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar misalnya dapat menjadi modal pembangunan apabila kualitasnya baik. Namun sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan apabila kualitasnya rendah.

Tabel 4.1
Kepadatan Penduduk Kabupaten Klungkung, 2015

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
Nusa Penida	202,84	45.460	224
Banjarangkan	45,73	38.650	845
Klungkung	29,05	57.360	1.975
Dawan	37,38	34.230	916
Kab. Klungkung	315	175.700	558

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Proyeksi Penduduk)

Persebaran penduduk yang merata merupakan suatu indikator keberhasilan suatu pembangunan. Hal ini dikarenakan jika persebaran penduduk tidak merata berarti pembangunan juga tidak merata. Untuk itu, masalah penyebaran penduduk yang tidak merata dirasa perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung lingkungan

yang tidak seimbang antar wilayah. Kepadatan penduduk merupakan indikator dalam mengetahui persebaran penduduk. Kepadatan penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2015 sebesar 558 jiwa/ km². Rata-rata penduduk per kecamatan sangat berbeda-beda, hal ini disebabkan karena luas wilayah dan letak wilayah kecamatan. Dari empat Kecamatan di Kabupaten Klungkung, pada Tahun 2015 kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Klungkung sebanyak 1.975 jiwa/km². Hal ini disebabkan karena kecamatan klungkung merupakan pusat dari semua kegiatan baik kegiatan pemerintahan maupun kegiatan perekonomian Kabupaten Klungkung. Terpadat kedua yaitu di Kecamatan Dawan sebanyak 916 jiwa/km², kemudian Kecamatan Banjarangkan sebanyak 845 jiwa/km², dan kecamatan terakhir dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Nusa Penida sebanyak 224 jiwa/km². Hal ini disebabkan Kecamatan Nusa Penida memiliki wilayah yang terluas dibandingkan tiga kecamatan lain yaitu 64,39 persen wilayah Klungkung dengan jumlah penduduk yang mendiami Kecamatan Nusa Penida hanya 25,87 persen penduduk Klungkung. Sedangkan Kecamatan Klungkung wilayah yang dimiliki hanya 9,22 persen dengan jumlah penduduk yang mendiami 32,65 persen. Oleh sebab itu di Tahun 2015, Kecamatan Klungkung menjadi kecamatan terpadat di Kabupaten Klungkung dan Kecamatan Nusa Penida menjadi kecamatan paling jarang penduduknya di Kabupaten Klungkung.

4.2 Komposisi Penduduk

Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan se-

bagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong Negara maju atau Negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Begitu pula sebaliknya untuk persentase *dependency ratio* yang semakin rendah.

Tabel 4.2
Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Klungkung, 2015

Kecamatan	Kelompok Umur			Dependency Ratio (%)	Child Dependency Ratio (%)	Old Dependency Ratio (%)
	0-14	15-64	65+			
Nusa Penida	10.830	29.690	4.940	53,12	36,48	16,64
Banjarangkan	9.180	24.790	4.680	55,91	37,03	18,88
Klungkung	13.900	38.590	4.870	48,64	36,02	12,62
Dawan	8.290	22.430	3.510	52,61	36,96	15,65
Kab. Klungkung	42.200	115.500	18.000	52,12	36,54	15,58

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Proyeksi Penduduk)

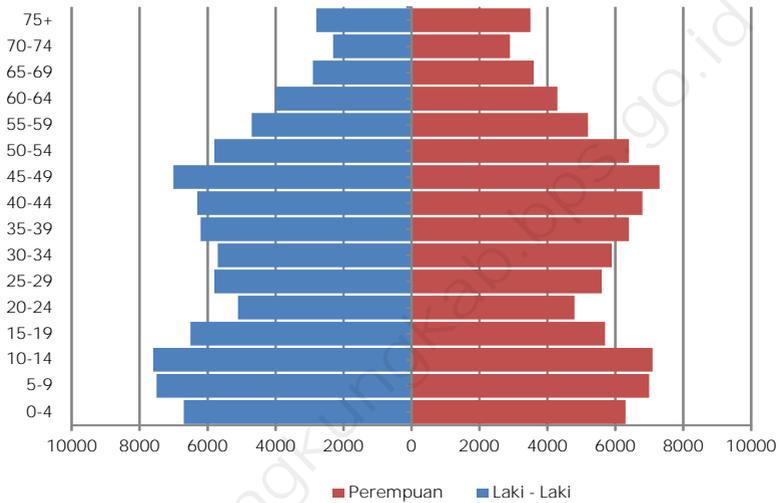
Tinggi rendahnya rasio ketergantungan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor budaya, sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi dll. Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa, Tahun 2015 Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Klungkung sebesar

52,12 persen. Angka itu berarti setiap 100 penduduk yang produktif menanggung 52 penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi pada Tahun 2015. Jika dilihat per kecamatan, rasio ketergantungan tertinggi berada di Kecamatan Banjarangkan sebesar 55,91 persen, yang artinya setiap 100 penduduk yang produktif di Kecamatan Banjarangkan menanggung 56 penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi di Kecamatan Banjarangkan pada Tahun 2015. Sedangkan Rasio Ketergantungan terendah berada pada Kecamatan Klungkung yaitu sebesar 48,64 persen.

Dari Tabel 4.2 juga dapat diketahui Kabupaten Klungkung di Tahun 2015 memiliki rasio ketergantungan anak yang tidak terlalu besar yaitu sebesar 36,54 persen. Yang artinya setiap 100 penduduk yang produktif menanggung 37 anak. Sedangkan rasio ketergantungan lanjut usia yang dimiliki Kabupaten Klungkung sebesar 15,58 persen menandakan bahwa setiap 100 penduduk yang produktif di Tahun 2015 menanggung 16 orang lanjut usia. Rasio ketergantungan anak dan rasio ketergantungan lanjut usia masing-masing kecamatan dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4.2. Rasio ketergantungan anak (*child dependency ratio*, RKA) dan rasio ketergantungan lanjut usia (*old dependency ratio*, RKLK). RKA dan RKLK sering digunakan sebagai indikator tingkat pembangunan suatu daerah, daerah yang sedang berkembang biasanya mempunyai tingkat fertilitas yang tinggi dan cenderung mempunyai rasio ketergantungan anak yang tinggi karena persentase anak dalam struktur penduduk masih tinggi. Sebaliknya, daerah yang sudah maju cenderung mempunyai rasio ketergantungan anak yang rendah. Sehingga

ga bisa dikatakan Kabupaten Klungkung merupakan daerah yang cenderung maju dikarenakan rasio ketergantungan anak dan rasio ketergantungan usia lanjut tidak tinggi.

Gambar 4.1 Piramida Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2015



Sumber : BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Proyeksi Penduduk)

Salah satu cara yang biasa digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin adalah dengan piramida penduduk (Gambar 4.1). Bentuk piramida penduduk dari suatu wilayah pada tahun tertentu dapat mencerminkan dinamika kependudukan di wilayah tersebut, seperti kelahiran, kematian dan migrasi. Suatu wilayah dengan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi biasanya ditandai dengan bentuk piramida yang alasnya besar

kemudian berangsur mengecil hingga ke puncak piramida. Sedangkan pada wilayah dengan tingkat kelahiran dan kematian yang rendah mempunyai bentuk piramida dengan alas yang tidak begitu besar dan tidak langsung mengecil hingga puncaknya.

Bentuk piramida penduduk Kabupaten Klungkung pada Tahun 2015 terlihat alas piramidanya tidak terlalu besar, hampir sama bahkan cenderung lebih kecil dari bagian tengah piramida. Hal ini bisa diartikan bahwa tingkat kelahiran dan migrasi masuk walaupun masih cukup tinggi namun sudah ada pengendalian.

Untuk proporsi jenis kelamin penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2015, dalam piramida penduduk terlihat bahwa tidak ada yang terlalu mendominasi. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dari usia muda, usia produktif maupun usia lanjut memiliki proporsi yang cukup berimbang. Untuk memperjelas perbandingan jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan dapat digunakan rasio jenis kelamin atau yang sering disebut dengan *sex ratio*.

Tabel 4.3
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
Kabupaten Klungkung, 2015

Kecamatan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Nusa Penida	22.630	22.830	45.460	99,12
Banjarangkan	19.280	19.370	38.650	99,54
Klungkung	28.170	29.190	57.360	96,51
Dawan	16.820	17.410	34.230	96,61
Kab. Klungkung	86.900	88.800	175.700	97,86

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Proyeksi Penduduk)

Sex Ratio merupakan perbandingan jumlah laki-laki dengan 100 perempuan. Jika angka *sex ratio* (SR) >100, berarti jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan, sebaliknya jika nilai SR <100 berarti jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding jumlah perempuan. Pada Tabel 4.3, terlihat bahwa *sex ratio* Kabupaten Klungkung pada Tahun 2015 berada dibawah 100 ini menandakan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Klungkung lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan. Kabupaten Klungkung memiliki *sex ratio* sebesar 97,86, itu artinya jumlah penduduk laki-laki 2,14 persen lebih sedikit dari penduduk perempuan atau dengan kata lain setiap 100 penduduk perempuan yang mendiami Kabupaten Klungkung terdapat sebanyak 98 penduduk laki-laki yang berada disana.

4.3 Perkembangan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000 jumlah penduduk Kabupaten Klungkung mencapai 155.262 jiwa. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan hingga mencapai 170.543 jiwa pada tahun 2010. Hal ini berarti bahwa setiap tahun terjadi kenaikan jumlah penduduk rata-rata sebesar 0,95 persen. Angka ini sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada periode 1990-2000 yang hanya sebesar 0,31 persen per tahun. Namun, bila dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Bali, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Klungkung masih dibawah dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk Bali yang mencapai 2,15 persen per tahun. Wa-

laupun demikian usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk masih perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Tabel 4.4
Perkembangan Kependudukan Kabupaten Klungkung, 2012 - 2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	172.900	173.900	174.800	175.700
2	Pertumbuhan Penduduk (%)	0,46	0,58	0,52	0,51
3	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	549	552	555	558

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Proyeksi Penduduk)

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa pertumbuhan penduduk tahun 2015 sebesar 0,51 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sedangkan kepadatan penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

89,71%

Baduta pernah diberi ASI

01



02

51,24%

Berobat Ke Praktek Dokter / Bidan

72,77

Rata - Rata Batang Rokok yang
Dihisap per Minggu

03



04

39,72%

KB IUD/Spiral

59,83%

Usia Perkawinan Pertama
21 - 24 Tahun

05



5.1 Taraf Kesehatan Masyarakat

Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa, karena dengan penduduk yang sehat pembangunan diharapkan dapat berjalan lancar. Keadaan kesehatan masyarakat juga merupakan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin baik keadaan kesehatan masyarakat, kesejahteraan semakin baik dan sebaliknya. Mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, dikaitkan dengan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai segi. Salah satu indikator nyata yang secara langsung dapat dilihat adalah dengan ukuran kesehatan jasmani yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis.

Keadaan kesehatan penduduk dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan penduduk pada umumnya. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, status kesehatan memberi pengaruh pada tingkat produktivitas. Pada Tahun 2015 status kesehatan penduduk tergambar dari angka kesakitan (persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan), lebih dari sepertiga penduduk Kabupaten Klungkung pernah mengalami keluhan kesehatan yaitu sebesar 33,46 persen. Keluhan kesehatan tersebut meliputi beberapa penyakit antara lain : panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare/buang-buang air, sakit kepala berulang, sakit gigi, dan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin baiknya kesadaran masyarakat Kabupaten Klungkung untuk menjalankan pola hidup sehat sehingga hanya sebagian kecil penduduk saja yang mengalami keluhan kesehatan. Sedangkan sisanya sebesar 66,54 persen tidak mengalami

keluhan kesehatan. Berdasarkan tabel 5.1 terlihat Angka Kesakitan Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan terganggu atau tidaknya kegiatan sehari—hari dari penduduk, disini terlihat bahwa sebesar 18,57 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan merasa terganggu kegiatan sehari—harinya terdiri dari 19,20 persen penduduk laki—laki dan 17,95 persen penduduk perempuan.

Tabel 5.1
Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2015

Jenis Kelamin	Kesakitan		Jumlah
	Terganggu Kegiatannya	Tidak Terganggu Kegiatannya	
Laki - Laki	19,20	13,10	32,30
Perempuan	17,95	16,63	34,59
Jumlah	18,57	14,89	33,46

Sumber : Susenas 2015

Gambar 5.1 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kabupaten Klungkung Tahun 2015



Sumber : Susenas 2015

Usaha yang ditempuh untuk mengatasi keluhan kesehatan tersebut yaitu dengan cara berobat. Berobat disini terdiri atas berobat jalan dan berobat sendiri. Berobat Sendiri yaitu berusaha mengobati sendiri dengan obat modern maupun tradisional sedangkan berobat jalan yaitu dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan baik modern maupun tradisional.

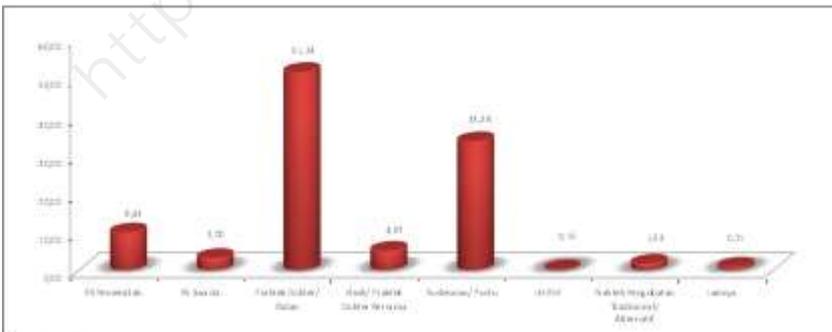
Gambar 5.2 Persentase Penduduk Menuntut Cara Berobat di Kabupaten Klungkung Tahun 2015



Sumber : Susenas 2015

Jika dilihat pada Gambar 5.2 penduduk Kabupaten Klungkung yang mengobati sendiri pada Tahun 2015 sebanyak 50,87 persen. Sedangkan persentase penduduk yang melakukan pengobatan jalan selama Tahun 2015 sebesar 73,47 persen, Penduduk yang mengobati sendiri lebih rendah daripada berobat jalan. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan cenderung memilih untuk memeriksakan keluhan kesehatannya kepada tenaga medis daripada mengobati sendiri keluhan kesehatannya.

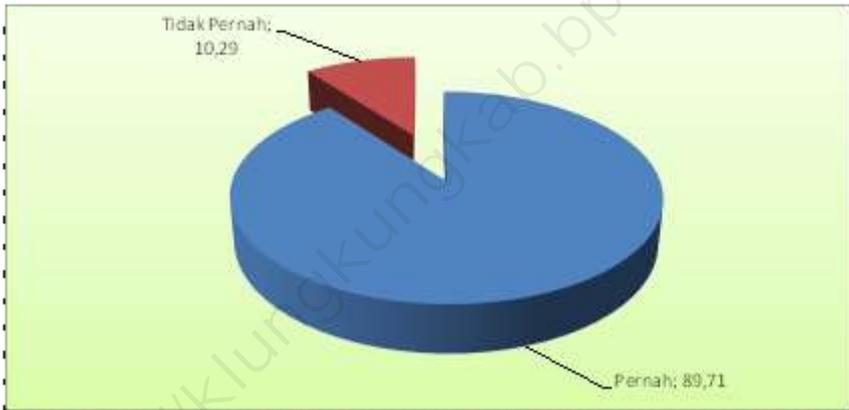
Indikasi bahwa tingkat kesadaran penduduk untuk memelihara kesehatannya dengan benar ditunjukkan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan (berobat jalan) yang persentasenya cukup tinggi. Berobat jalan yang dilakukan oleh penduduk Kabupaten Klungkung sebagian besar dengan mendatangi praktek dokter yaitu sebesar 51,24 persen, puskesmas/pustu sebesar 33,28 persen, mengunjungi rumah sakit pemerintah sebesar 9,63 persen, mengunjungi klinik/praktek dokter bersama sebesar 4,87 persen, mengunjungi rumah sakit swasta sebesar 3 persen, mengunjungi praktek pengobatan tradisional sebesar 1,53 persen dan persentase terendah dengan mengunjungi Lainnya (misalnya dukun bersalin) sebesar 0,71 persen dan mengunjungi UKBM sebesar 0,15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Klungkung sudah paham mengenai kesehatan, sehingga ketika mereka mengalami keluhan kesehatan yang tergolong tidak ringan, mereka segera mendatangi tenaga kesehatan yang ahli di bidangnya untuk menghindari efek samping atau komplikasi jika keluhan kesehatan tersebut salah penanganan atau tidak segera ditangani dengan baik oleh tenaga kesehatan.



5.2 Kesehatan Anak

Gizi balita sangat ditentukan oleh pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada balita tersebut. Pemberian ASI memang sangat penting dalam masa tumbuh kembang balita. ASI terbukti mampu meningkatkan daya tahan tubuh balita. Tubuh balita memang sangat rentan terhadap penyakit, untuk itu dibutuhkan ASI sebagai alat pertahanan tubuh yang melindungi balita dari bahaya penyakit

Gambar 5.4 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah di Beri ASI Kabupaten Klungkung Tahun 2015



Sumber : Susenas 2015

Anak usia kurang dari 2 tahun yang pernah diberi ASI di Tahun 2015, menunjukkan angka yang cukup baik. Dimana tingkat pemberian ASI sudah mencapai 89,71 persen. Hal ini menjadi indikasi bahwa semakin tingginya kesadaran para ibu akan pentingnya pemberian ASI kepada balita.

Tabel 5.2
 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi
 Kabupaten Klungkung, 2012 - 2015

Jenis Imunisasi	2012	2013	2014	2015
BCG	99,67	99,81	99,69	94,48
Campak	84,77	77,15	89,98	77,19
DPT	94,12	96,04	97,75	91,83
Polio	96,39	97,37	98,90	96,05
Hepatitis B	97,95	94,86	98,17	88,77

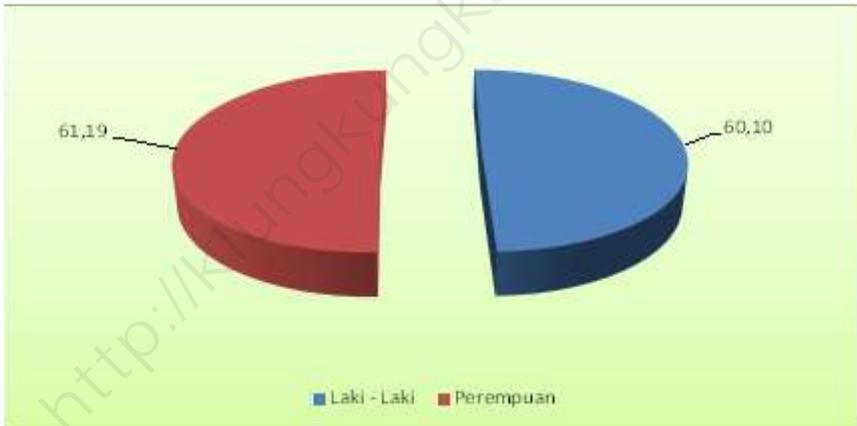
Sumber : Susenas 2015

Imunisasi adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah di-matikan ke dalam tubuh anak balita dengan cara suntik atau minum, dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu pada tubuh. Imunisasi merupakan upaya pemeliharaan kesehatan yang cukup penting karena sifatnya memberi pencegahan terhadap penyakit tertentu. Imunisasi terutama ditujukan kepada bayi/balita, dengan jenis imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B. Dengan memperhitungkan faktor-faktor lain yang merupakan bagian preventif maka data banyaknya anak yang pernah diimunisasi dapat memberikan gambaran seberapa besar kemungkinan seorang anak dapat terhindar dari suatu jenis penyakit, sehingga tindakan pencegahan atau persiapan yang lebih dini dapat dilakukan.

Program imunisasi di Kabupaten Klungkung sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dari data hasil Susenas 2015 dimana dari tahun ke tahun persentase balita yang pernah mendapat imunisasi mengalami

peningkatan walaupun pada tahun 2015 terjadi penurunan persentase balita yang mendapat imunisasi. Persentase tertinggi adalah jenis imunisasi Polio yang mencapai 96,05 persen, BCG sebesar 94,48 persen, DPT sebesar 91,83 persen, Hepatitis B sebesar 88,77 persen dan Campak sebesar 77,19 persen. Hal ini menandakan para ibu sudah menyadari akan pentingnya imunisasi bagi balitanya. Kesadaran ibu untuk menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dimasa depan sangat membantu suksesnya program imunisasi ini disamping itu tempat pelayanan imunisasi yang relatif mudah dijangkau oleh ibu-ibu seperti di puskesmas maupun posyandu di setiap desa.

Gambar 5.5 Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015



Sumber : Susenas 2015

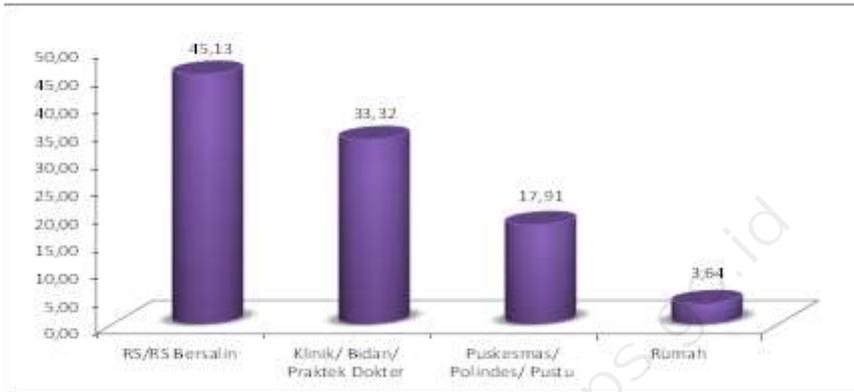
Sebesar 60,10 persen Balita Laki—Laki telah mendapat imunisasi lengkap yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan balita perempuan sebesar 61,19 persen.

Dalam proses persalinan tenaga penolong pada persalinan sangat menentukan keberhasilan persalinan maupun pengaruhnya terhadap kesehatan ibu dan bayi yang ditolong. Selain itu penolong kelahiran juga berpengaruh terhadap angka kematian bayi. Jika kelahiran tidak dibantu oleh tenaga kesehatan, kemungkinan untuk bayi meninggal akan semakin tinggi. Sehingga angka kematian bayi merupakan salah satu indikator juga yang digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan penduduk suatu daerah.

Data tempat melahirkan dan penolong kelahiran bayi dapat dijadikan indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat berdasarkan kesehatan ibu dan anak, persalinan di tempat fasilitas kesehatan yang memadai serta ditolong oleh tenaga medis, seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun, famili, atau lainnya.

Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K), menyatakan bahwa dengan diluncurkannya Kartu Indonesia Sehat (KIS) akan mendorong masyarakat untuk bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong tenaga kesehatan, akan mempercepat akses ibu dan bayi dalam mencapai penanganan yang cepat apabila terjadi komplikasi. Selain itu, pelibatan keluarga dan masyarakat juga dapat membantu upaya pencegahan kematian ibu dan bayi di lingkungannya masing-masing.

Gambar 5.6 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kandung dan Tempat Melahirkan Anak Lebih Hidup yang Terjadi Tahun 2015



Sumber : Sensus 2015

Berdasarkan gambar 5.6 terlihat bahwa Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin merupakan tempat melahirkan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu mencapai 45,13 persen, disusul tempat melahirkan di klinik/bidan/prktek dokter yaitu sebesar 33,32 persen, serta tempat melahirkan di Puskesmas/Polindes/Pustu yaitu sebesar 17,91 persen secara umum di kabupaten Klungkung proporsi tempat melahirkan di fasilitas kesehatan sudah sangat tinggi yaitu mencapai 96,36 persen yang berarti hanya 3,64 persen saja yang melahirkan bukan di fasilitas kesehatan (rumah). Perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan memungkinkan untuk memperoleh akses ke pelayanan obstetrik darurat dan perawatan bayi baru lahir, meskipun pelayanan ini tidak selalu tersedia di semua fasilitas kesehatan.

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan barometer pelayanan kesehatan di suatu negara. Bila AKI masih tinggi berarti pelayanan kesehatan ibu belum optimal. Sementara itu, Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat, karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Tingginya angka kematian bayi tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah masih kurangnya kemampuan dan keterampilan penolong persalinan.

Gambar 5.7 Persentase Persepsi Perempuan 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Penolong Proses Kelahiran Tradisional Tahun 2015



Sumber : Susenas 2015

Berdasarkan Gambar 5.7 terlihat bahwa 100 persen kelahiran baduta telah ditolong oleh tenaga medis terlatih. Kesadaran perempuan untuk melahirkan secara sehat dan aman sudah cukup tinggi, hal ini

terlihat cukup tingginya persentase penolong kelahiran oleh dokter kandungan, yaitu mencapai 41,84 persen. Disamping itu tingginya persentase penolong kelahiran yang ditangani oleh bidan yaitu sebesar 52,63 persen, memberikan gambaran bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah berupa penyebaran bidan-bidan ke seluruh desa/kelurahan di seluruh Klungkung ternyata telah membuahkan hasil. Sedangkan sisanya sebesar 3,28 persen penolong kelahiran oleh dokter umum dan 2,25 persen penolong kelahiran oleh perawat.

5.3 Keluarga Berencana

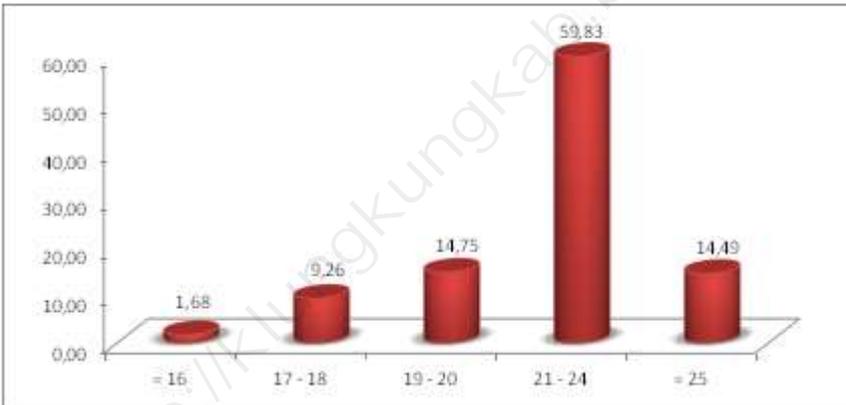
Usia perkawinan wanita mempunyai pengaruh bagi perkembangan penduduk suatu wilayah karena akan berpengaruh terhadap tingkat kelahiran. Selain itu usia perkawinan juga berpengaruh terhadap keadaan kesehatan suatu keluarga terutama kesehatan ibu melahirkan dan anak yang dilahirkan. Informasi keluarga berencana memberikan pengertian kepada pasangan suami istri mengenai usia terbaik hamil pertama kali, kapan berhenti melahirkan, berapa tahun jarak ideal antara anak yang satu dengan berikutnya dan jumlah anak yang ideal.

Pasangan usia subur hendaknya paham bahwa kehamilan bagi istri yang terlalu muda dan terlalu tua tidaklah baik bagi kesehatan bayi maupun wanita tersebut. Wanita yang belum berusia 17 tahun belum siap untuk hamil, baik dari segi fisik maupun psikis. Kemungkinan besar bayi yang lahir akan menderita berat badan lahir rendah (BBLR), yaitu berat badan bayi pada saat lahir kurang dari 2.500 gram. Begitu pula bila kehamilan terjadi pada wanita usia 35 tahun keatas, resiko ke-

mation juga tinggi baik untuk Ibu maupun janinnya.

Pada Gambar 5.8, terlihat bahwa di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2015 usia perkawinan pertama yang dominan adalah pada usia 21-24 tahun yaitu sebesar 59,83 persen. Usia ini merupakan usia yang matang secara fisik ataupun mental untuk usia perkawinan. Namun masih ada penduduk masih berusia ≤ 16 tahun sudah kawin yaitu sebesar 1,68 persen, angka ini tidak besar namun masih perlu untuk di cermati.

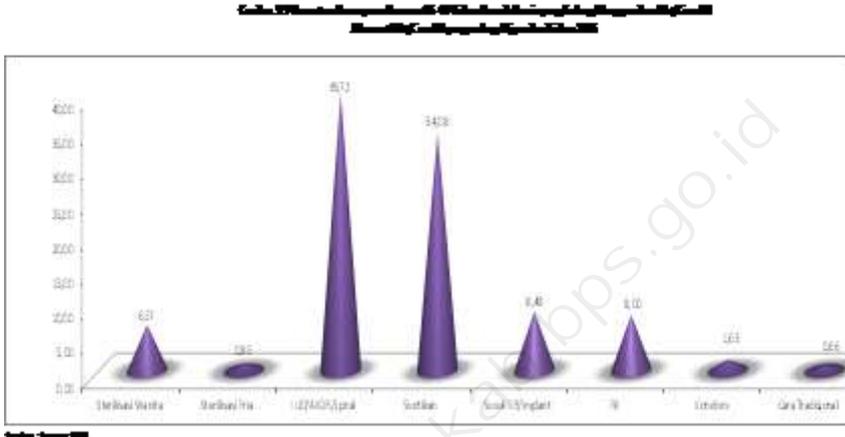
Gambar 5.8 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Menurut 10 Tahun Ke Atas Menurut Usia Perkawinan Pertama Tahun 2015



Sumber: Sensus 2015

Pertumbuhan/pertambahan penduduk sangat ditentukan oleh kelahiran selain kematian dan migrasi penduduk oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk tersebut adalah menurunkan tingkat kelahiran. Penurunan

ini bisa dilakukan melalui program keluarga berencana dengan cara penggunaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur, program KB itu sendiri sudah dimulai sejak tahun 1970.



Dalam usaha menggalakkan pelaksanaan program keluarga berencana, pemerintah mengalami berbagai persoalan karena adanya heterogenitas penduduk sehingga mempengaruhi pelaksanaan program. Seseorang yang tinggal di desa mungkin akan menggunakan cara berbeda dengan orang yang tinggal di kota. Wanita dengan umur yang lebih tua menggunakan cara yang tidak sama dengan yang berumur muda. Demikian pula variabel lain seperti agama, status ekonomi, jumlah anak yang dilahirkan hidup tidak disangkal lagi akan mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi bagi seorang wanita. Sasaran dan pelaksanaan program keluarga berencana adalah Pasangan Usia Subur yang biasa disingkat PUS, khususnya wanita yang berumur antara 15 – 49 tahun.

Metode penggunaan alat KB pada Tahun 2015 yang paling banyak diminati penduduk Kabupaten Klungkung adalah IUD/AKDR/Spiral yaitu sebesar 39,72 persen, disusul metode suntikan sebesar 34,08 persen kemudian metode susuk KB/implant yaitu sebesar 8,48 persen, sedangkan metode yang lainnya seperti vasektomi sebesar 0,85 persen, tubektomi sebesar 6,57 persen, pil KB sebesar 8 persen, kondom sebesar 1,63 persen dan cara tradisional sebesar 0,66 persen. IUD/AKDR/Spiral banyak diminati karena dianggap praktis, 1(satu) kali pemasangan IUD/AKDR/Spiral dapat dipergunakan hingga 4 tahun.

Minat masyarakat Kabupaten Klungkung terhadap alat/cara KB masih cukup tinggi. Gambar 5.7 menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen wanita berumur 15-49 tahun pemakai alat/cara KB memilih alat kontrasepsi yang efektif. Hal ini merupakan suatu indikasi bahwa pengetahuan dan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam keluarga berencana sudah cukup tinggi, dengan demikian sangat berdampak pada kesehatan masyarakat pada umumnya dan kualitas masyarakat pada khususnya. Peran serta kaum pria terhadap partisipasi keluarga berencana masih sangat kecil, hal ini terlihat dari 2 (dua) alat kontrasepsi untuk pria yakni MOP dan kondom hanya mencapai masing—masing sebesar 0,85 persen dan 0,73 persen pada tahun 2015.

5.4 Kebiasaan Hidup Sehat

Kebiasaan hidup sehat dapat dilihat dari kebiasaan merokok dan jumlah batang yang dihisap dalam satu minggu oleh penduduk Klungkung. Dari Gambar 5.10 terlihat bahwa sebesar 13,72 persen

penduduk Klungkung mempunyai kebiasaan merokok setiap hari, sedangkan sebesar 1,59 persen mempunyai kebiasaan merokok tetapi tidak setiap hari dan sisanya sebesar 84,69 persen tidak mempunyai kebiasaan merokok. Menarik untuk dicermati terkait perilaku kebiasaan merokok adalah adanya perubahan perilaku merokok penduduk. Terlihat adanya perubahan perilaku merokok pada penduduk Klungkung, sebesar 1,60 persen penduduk Klungkung 5 tahun ke atas yang tidak merokok tembakau selama sebulan terakhir, sebelumnya mempunyai kebiasaan merokok setiap hari. Sementara itu, persentase penduduk Klungkung 5 tahun ke atas yang tidak merokok tembakau selama sebulan terakhir, yang sebelumnya merokok tidak setiap hari sebesar 1,44 persen. Sedangkan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang merokok tembakau tidak setiap hari selama sebulan terakhir tetapi sebelumnya merokok setiap hari sebesar 39,77 persen.

Gambar 5.10 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Merokok Tembakau Selama Sebulan Terakhir Menurut Kebiasaan Merokok



Sumber : Susenas, 2015

Pada Gambar 5.11 tercermin bahwa jumlah batang rokok yang dihisap dalam satu minggu oleh penduduk Klungkung yang merokok masih cukup tinggi. Persentase penduduk Klungkung yang menghisap rokok ≥ 60 batang rokok per minggu sebesar 51,41 persen, sementara itu yang menghisap sebanyak 30-59 batang per minggu sebesar 25,83 persen, menghisap sebanyak 15-29 batang per minggu sebesar 17,48 persen, sedangkan yang menghisap 7-14 batang rokok per minggu dan 1-6 batang per minggu sebesar 3,44 persen dan 1,83 persen.

Gambar 5.11 Persentase Penduduk Remaja 5 Tahun Ke Atas yang Merokok Berdasarkan Status Sekolah Terakhir Menurut Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu Tahun 2015



Sumber : Sensus 2015

· Male Vs Female ·



Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Menurut UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003, definisi pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan, dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Pada umumnya, pendidikan dilakukan secara berjenjang dimulai dari jenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar (meliputi SD dan SMP atau sederajat), pendidikan menengah (meliputi SMA dan SMK, atau sederajat), dan pendidikan tinggi (strata dan non strata).

Tidak sedikit kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas manusia. Disamping sarana dan prasarana pendidikan, seperti jumlah sekolah, serta kuantitas dan kualitas guru, berbagai hal lain yang

menunjang kegiatan pendidikan sangat diperlukan sebagai satu kesatuan yang saling menunjang dan saling terkait. Bidang pendidikan merupakan bidang penentu program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Gambaran keadaan pendidikan di Kabupaten Klungkung akan dilihat secara khusus melalui beberapa indikator penting, yakni kemampuan baca tulis penduduk (Angka Melek Huruf), Tingkat Partisipasi Sekolah yang meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan.

6.1 Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat menuju hidup sejahtera. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf yang dalam hal ini didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Upaya pemberantasan buta huruf oleh pemerintah sudah dimulai sejak tahun 1951 dengan penanganan secara berencana kemudian pada tahun 1972 pemerintah telah memperkenalkan **“pendidikan aksarawan fungsional”**, yakni diajarkan membaca, menulis dan berhitung serta keterampilan tertentu terhadap masyarakat yang buta aksara.

Persentase penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2015 yang melek huruf atau yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya sebe-

sar 86,32 persen sementara sekitar 13,68 persen tidak dapat membaca huruf latin/huruf lainnya atau yang buta huruf. Ditinjau dari jenis kelamin ternyata persentase melek huruf penduduk laki-laki pada Tahun 2015 lebih tinggi dibanding penduduk perempuan yaitu 92,17 persen berbanding 80,72 persen atau dengan kata lain tingkat buta huruf penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki.

Gambar 6.1 Persentase Angka Melek Huruf Kabupaten Klungkung Tahun 2013 - 2015



Sumber : Sensus 2013 - 2015

Tingkat kemampuan membaca dan menulis pada Tahun 2015 sedikit meningkat dibanding Tahun 2014 yaitu sekitar 0,28 persen, begitu pula dari Tahun 2013 meningkat sekitar 1,57 persen ke Tahun 2014 (Gambar 6.1). Dengan meningkatnya persentase ini bisa disimpulkan bahwa tingkat buta huruf mengalami sedikit penurunan. Jika ditinjau dari jenis kelamin maka terlihat bahwa andil kenaikan persentase melek huruf sangat dipengaruhi meningkatnya persentase melek huruf

penduduk perempuan yaitu sebesar 0,58 persen. Kondisi ini mencerminkan makin meratanya akses pendidikan yang diterima masyarakat meskipun untuk kaum laki-laki masih perlu perhatian lebih serius.

Menarik untuk dikaji, mengapa masih ada penduduk usia 15 tahun keatas yang buta huruf di Kabupaten Klungkung. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah penduduk lanjut usia yang lahir disaat pembangunan tidak sebaik sekarang ini. Meskipun pemerintah melaksanakan program pengentasan buta huruf tetapi kondisi penduduk pada usia lanjut sudah mempunyai keterbatasan baik fisik maupun daya tangkap sehingga pengentasan buta huruf tidak maksimal tercapai.

6.2 Tingkat Partisipasi Sekolah

6.2.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai tanpa memperhitungkan jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya. APS biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun) dan SMA (16-18 tahun). Secara matematis APS dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{APS}_{(7-12\text{th})} = \frac{\text{Penduduk Usia 7-12 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \times 100 \%$$

Keterangan:

$APS_{(7-12th)}$ = Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun

Tabel 6.1
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kelompok Usia Sekolah
di Kabupaten Klungkung, 2011 - 2015

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah		
	7-12	13-15	16-18
2011	99,13	97,21	69,25
2012	100	93,84	75,07
2013	100	96,65	82,77
2014	99,70	100	94,49
2015	99,66	97,53	94,28

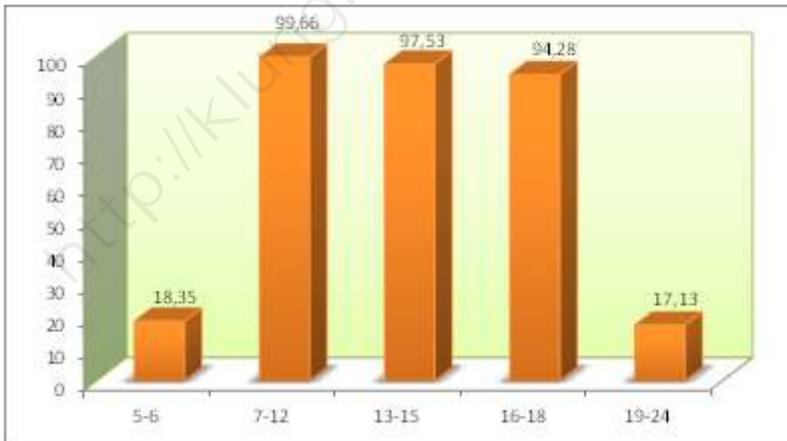
Sumber: Susenas, 2011 - 2015

Pada tahun 2015, $APS_{(7-12th)}$ sebesar 99,66 persen atau turun 0,04 persen dari tahun 2014. Ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh penduduk usia 7–12 tahun telah mengenyam pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikan yang sedang ditempuhnya. Sedangkan $APS_{(13-15)}$ sebesar 97,53 persen atau turun sebesar 2,47 persen dari tahun 2014 dan $APS_{(16-18)}$ sebesar 94,28 persen atau turun 0,21 persen dari tahun 2014.

Umur penduduk dalam penghitungan APS tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama umur 7—12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua umur 13—15 tahun untuk tingkat pendidikan SLTP, dan kelompok ketiga umur 16—18 tahun untuk tingkat pendidikan SLTA. Namun, pada ken-

yataannya menunjukkan bahwa cukup banyak penduduk berumur 5—6 tahun telah memasuki pendidikan dasar, sehingga dalam publikasi ini ditampilkan pula APS untuk kelompok umur 5—6 tahun. Untuk mengetahui APS pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, dapat dilihat dari APS kelompok umur 19—24 tahun. Berdasarkan gambar 6.2 terlihat bahwa APS kelompok umur 5—6 tahun di Kabupaten Klungkung sebesar 18,35 persen. Artinya 18 persen penduduk Klungkung usia 5—6 tahun sudah bersekolah pada jenjang pendidikan dasar. APS kelompok umur 5—6 tahun penduduk laki—laki lebih tinggi dibanding perempuan, yaitu 22,97 persen berbanding 14,43 persen, sedangkan APS kelompok umur 19—24 tahun di Kabupaten Klungkung sebesar 17,13 persen, APS penduduk laki—laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, yaitu 21,35 persen berbanding 12,52 persen.

**Gambar 6.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2015**



Sumber : Susenas 2015

6.2.2 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih sekolah pada jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Secara matematis, APM dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{APM SD} = \frac{\text{Penduduk Usia 7-12 Tahun Yang Masih Sekolah SD}}{\text{Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$$

Keterangan:

APM SD = Angka Partisipasi Murni SD

Pada dasarnya APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Dengan APM maka akan tergambarkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya atau dengan kata lain sudah bersekolah secara tepat waktu sesuai dengan umur mereka.

APM juga bisa disusun menurut jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Umumnya APM akan selalu lebih kecil atau maksimal sama dengan APS. APM tidak memberikan analisa yang berbeda jauh dari APS, tetapi hanya menggambarkan ketepatan seorang anak untuk bersekolah sesuai dengan umur mereka.

Tabel 6.2
Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Klungkung, 2011 - 2015

Tahun	Angka Partisipasi Murni		
	SD	SMP	SMA
2011	92,82	67,69	70,00
2012	96,08	68,69	68,33
2013	97,63	93,74	76,28
2014	97,66	79,01	83,56
2015	96,47	87,68	82,29

Sumber: Susenas, 2011-2015

APM dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan walaupun terjadi penurunan pada tahun 2015 terutama pada APM SD dan APM SMA tetapi terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada APM SMP. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam pemanfaatan fasilitas pendidikan sesuai usia sekolah. Berdasarkan hasil Susenas 2015, APM SD Kabupaten Klungkung sebesar 96,47 persen turun sebesar 1,19 persen dari APM SD tahun 2014, yang mengindikasikan bahwa sebanyak 96,47 persen penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD. APM SMP sebesar 87,68 persen naik secara signifikan sebesar 8,67 persen dari APM SMP tahun 2014, yang mengindikasikan bahwa 87,68 persen penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SMP dan APM SMA sebesar 82,29 persen turun sebesar 1,27 persen dari tahun 2014, hal ini mengindikasikan bahwa 82,29 persen penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA.

6.2.3 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap kelompok umur jenjang pendidikan tersebut. Tidak berbeda dengan APS dan APM, APK juga dibedakan menurut jenjang pendidikan dan secara matematis diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{APK SD} = \frac{\text{Penduduk Yang Bersekolah di SD}}{\text{Penduduk Usia 7-12 tahun}} \times 100\%$$

Keterangan :

APK SD = Angka Partisipasi Kasar SD

APK pada umumnya digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Dengan APK, maka dapat terlihat bagaimana kondisi murid pada suatu jenjang pendidikan tanpa melihat usianya. Kalau APS dan APM melihat penduduk usia sekolah sesuai jenjang pendidikannya, maka APK melihat banyaknya atau persentase penduduk pada jenjang pendidikan tertentu tanpa dibatasi oleh usia mereka. Jika nilai APK menunjukkan angka mendekati atau lebih dari 100 persen berarti ada penduduk yang bersekolah tetapi belum mencukupi umur atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini menggambarkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari pada target yang sesungguhnya.

Analisis APK dilakukan pada 3 (tiga) jenjang/tingkat pendidikan, yaitu SD, SLTP, dan SLTA.

Tabel 6.3
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Klungkung, 2011 - 2015

Tahun	Angka Partisipasi Kasar		
	SD	SMP	SMA
2011	103,29	88,65	103,5
2012	107,87	75,16	101,51
2013	105,42	80,89	121,78
2014	107,57	90,91	115,67
2015	105,96	94,29	101,91

Sumber: Susenas, 2011-2015

Pada tahun 2015, APK SD sebesar 105,96 persen turun sebesar 1,61 persen dari tahun 2014, APK SMP sebesar 94,29 persen naik sebesar 3,38 persen dari tahun 2014 dan APK SMA sebesar 101,91 persen turun sebesar 13,76 persen dari tahun lalu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK yang lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa terdapat penduduk yang belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang bersekolah pada jenjang tersebut.

6.3 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di suatu daerah, selain dilihat dari angka melek huruf dan partisipasi sekolah, juga dapat diamati dari indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun keatas. Indikator ini menunjukkan kemampuan intelektual dan keterampilan teknis yang didapatkan dari lembaga pendidikan formal. Dalam analisis, indikator ini sering kali digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan pendidikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk diduga semakin baik kualitas SDM daerah tersebut.

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki seseorang merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh rata-rata penduduk suatu daerah kemungkinan akan semakin tinggi taraf intelektualitas daerah tersebut.

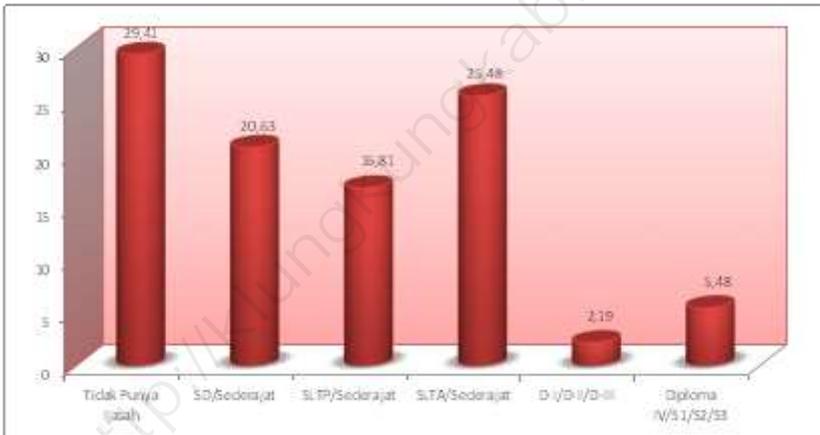
Tabel 6.4
Penduduk 15 Tahun Ke Atas
Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki
di Kabupaten Klungkung, 2011 - 2015

No	Ijazah Tertinggi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Tidak Punya Ijazah	19,1	15,98	16,06	31,5	29,41
2	SD/Sederajat	23,07	27,21	25,88	22,52	20,63
3	SLTP/Sederajat	20,45	20,25	20,95	16,61	16,81
4	SLTA/Sederajat	27,34	27,06	29,32	22,06	25,48
5	Perguruan Tinggi	10,03	9,5	7,79	7,32	7,67

Sumber: Susenas, 2011-2015

Secara umum selama kurun waktu lima tahun terakhir tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Klungkung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2015, sekitar 33,15 persen penduduk sudah menamatkan pendidikan hingga SMA atau lebih tinggi. Sekitar 16,81 persen penduduk hanya menamatkan pendidikan hingga SMP dan sisanya sekitar 50,04 persen penduduk berpendidikan rendah yaitu penduduk yang hanya menamatkan pendidikannya hingga SD atau lebih rendah.

Gambar 6.3 Pendidikan 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Yang Didapat Tahun 2015



Sumber: Sensus 2015

Berdasarkan Gambar 6.3 terlihat bahwa masih banyak penduduk Klungkung yang tidak mempunyai ijazah, sebesar 29,41 persen penduduk Klungkung tidak mempunyai ijazah, sedangkan sisanya

mempunyai ijazah dengan berbagai jenis tingkatan, 20,63 persen penduduk Klungkung mempunyai ijazah SD/Sederajat, 16,81 persen mempunyai ijazah SMP/Sederajat, 25,48 persen mempunyai ijazah SMA/Sederajat, 2,19 persen mempunyai ijazah D-I/D-II/D-III, dan 5,48 persen mempunyai ijazah Diploma IV/S1/S2/S3. Masih tingginya persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain masalah ekonomi, banyaknya orang tua yang lahir pada masa di mana pendidikan bukanlah kebutuhan utama dsb.

<http://klungkungkab.bps.go.id>

94,03%

Rumah Milik Sendiri

PERUMAHAN KLUNGKUNG

2015



99,64%

Atap Layak



98,51%

Lantai Bukan Tanah



98,83%

Dinding Permanen



99,42%

Listrik Dari PLN



82,70%

Akses Air Bersih



98,73%

Kloset Leher Angsa



<http://iklungkurkab.go.id>

7.1 Fasilitas Bangunan Tempat Tinggal

Kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia selain sandang, pangan dan pendidikan adalah perumahan. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung tetapi juga sebagai tempat beristirahat sehingga faktor keamanan, kesehatan, ketenangan dan kenyamanan merupakan unsur-unsur penting untuk menilai kondisi suatu rumah, bahkan nilai estetika juga menjadi pertimbangan utamanya untuk kelompok masyarakat tertentu.

Terkait dengan permasalahan perumahan secara umum, kualitas rumah sebagai tempat tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan sehingga disebut sebagai rumah ideal adalah rumah yang dalam kondisi yang baik, cukup luas untuk satu keluarga, memenuhi syarat kesehatan yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain daripada itu fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga akan mencerminkan tingkat kesejahtraannya, keadaan dan kualitas serta fasilitas lingkungan perumahan hendaknya memberikan sumbangan dalam menikmati kenyamanan hidup sehari-hari.

Kelengkapan dan kenyamanan sebuah rumah juga tergantung pada indikator lainnya seperti tingkat kesejahteraan rumah tangga maupun tingkat pendidikan, semakin tinggi kesejahteraan maka akan semakin lengkap fasilitasnya demikian juga semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin mengerti tentang hidup sehat.

Perbedaan keadaan ekonomi menyebabkan perbedaan cara dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Masyarakat dengan

penghasilan tinggi umumnya memiliki kesempatan lebih besar untuk memiliki rumah sendiri dibanding masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mengontrak, sewa, atau tinggal di rumah milik saudara/ lainnya, baik dengan mengeluarkan biaya maupun tanpa mengeluarkan biaya.

Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Klungkung Tahun 2015



Status penguasaan tempat tinggal dibedakan atas milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dinas, dan lainnya. Persentase rumah tangga yang status penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri pada Tahun 2015 menduduki urutan teratas yaitu 94,03 persen sementara persentase status kontrak/sewa yaitu 3,98 persen, persentase bebas sewa sebesar 1,56 persen sedangkan persentase dinas dan lainnya sebesar 0,27 persen dan 0,16 persen. Status penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri menjadi dominan disebabkan penduduk Kabupaten Klungkung merupakan penduduk asli dan sudah lama tinggal di Klungkung.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat, kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktifitas dasar manusia di dalam rumah yang meliputi, tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci, masak dan ruang gerak lainnya. Sementara Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang mempunyai luas lantai minimum 7,2 m² per jiwa . Luas lantai rumah yang ditempati rumah tangga dapat dijadikan pendekatan untuk menilai kesejahteraan rumah tangga. Di Indonesia standar rumah sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan, dan khusus tentang luas rumah tercantum pada pasal 22 ayat 3 yang menyebutkan luas lantai rumah tinggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 m².

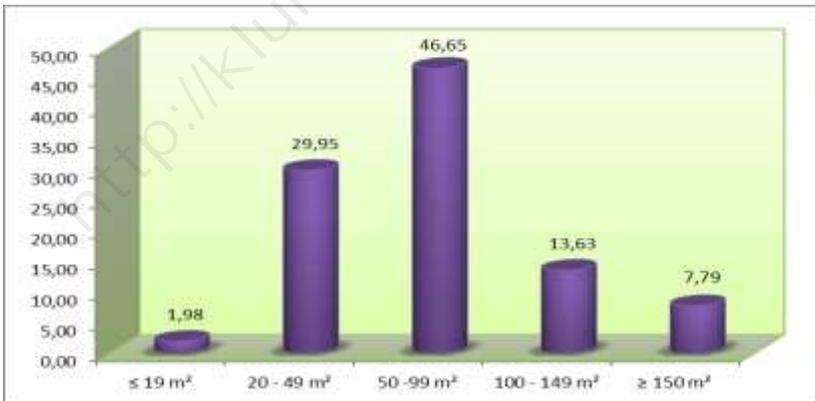
Luas bangunan tempat tinggal sehat harus cukup untuk penghuni di dalamnya atau disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Luas bangunan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan kepadatan penghuni (*overcrowded*). Salah satu dampak dari hunian *overcrowded* ini adalah mudahnya penularan penyakit antar penghuni rumah.

Berdasarkan gambar 7.2 terlihat bahwa hampir sebagian besar penduduk Klungkung mendiami tempat tinggal dengan luas lantai 50-99m² yaitu sebesar 46,65 persen, sedangkan sebesar 1,98 persen masih

mendiami tempat tinggal dengan luas lantai $\leq 19 \text{ m}^2$ dan 7,79 persen mendiami tempat tinggal dengan luas lantai $\geq 150 \text{ m}^2$. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Klungkung sudah menempati rumah sesuai dengan standar yang tercantum di dalam Undang—undang.

Jika dilihat berdasarkan luas lantai per kapita, terlihat bahwa sebesar 6,37 persen penduduk Klungkung masih menempati tempat tinggal dengan luas lantai per kapita $\leq 7,2 \text{ m}^2$, sebesar 10,05 persen penduduk klungkung menempati tempat tinggal dengan luas lantai per kapita 7,3—9,9 m^2 dan sebesar 83,58 persen penduduk klungkung menempati tempat tinggal dengan luas lantai per kapita $\geq 10 \text{ m}^2$. Hal ini menunjukkan sebagian besar penduduk klungkung telah menempati rumah sehat sesuai dengan kriteria WHO dan rumah layak huni sesuai kriteria peraturan menteri negara perumahan.

Gambar 7.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Klungkung Tahun 2015



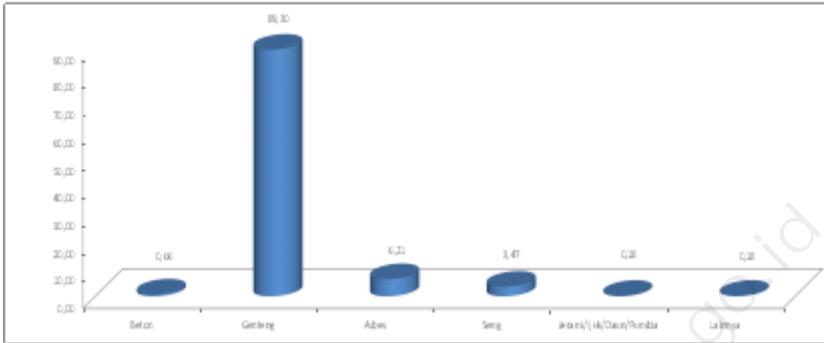
Sumber : Susenas 2015

Kondisi dan kualitas rumah yang ditempati juga dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menggambarkan semakin baik keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Jenis atap yang digunakan merupakan salah satu faktor penentu baik buruknya kondisi dan kualitas rumah tempat tinggal.

Atap memiliki fungsi signifikan sebagai pelindung dari hujan maupun panas, sehingga jenis atap biasanya dipilih dari bahan yang sesuai dengan kondisi cuaca di suatu wilayah. Di dataran rendah, biasanya atap rumah memakai genteng dengan tujuan untuk mengurangi suhu panas, sedangkan masyarakat di dataran tinggi lebih memilih atap dari seng agar panas matahari yang diterima dapat disimpan dan dapat menghangatkan bagian dalam rumah. Atap dari genteng lebih cocok untuk rumah di daerah tropis. Kriteria rumah yang layak dan sehat untuk dijadikan tempat tinggal adalah apabila rumah tersebut memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, atap terluas berupa beton atau genteng serta luas lantai terluas bukan berupa tanah.

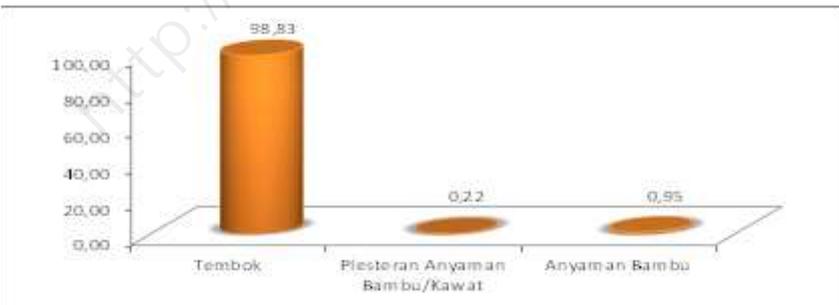
Berdasarkan Gambar 7.3 menunjukkan bahwa jenis atap terluas rumah tangga di Klungkung adalah genteng sebesar 89,30 persen, di urutan kedua adalah asbes sebesar 6,21 persen, seng sebesar 3,47 persen, beton sebesar 0,66 persen, sedangkan jerami/ijuk/daun/rumbia dan lainnya masing—masing sebesar 0,18 persen.

Gambar 7.3 Persentase Bangunan Tempat Tinggal Tidak Berdinding Tembok Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Klungkung Tahun 2015



Agar memenuhi standar kesehatan, jenis dinding rumah yang dipilih adalah dinding dari bahan yang kedap air sehingga dinding terhindar dari basah dan lembab, serta tidak berlumut. Hasil Susenas 2015 menunjukkan bahwa 98,83 persen bangunan tempat tinggal rumah tangga di Klungkung sudah berdinding tembok dan sisanya berdinding plesteran anyaman bamboo/kawat dan anyaman bambu.

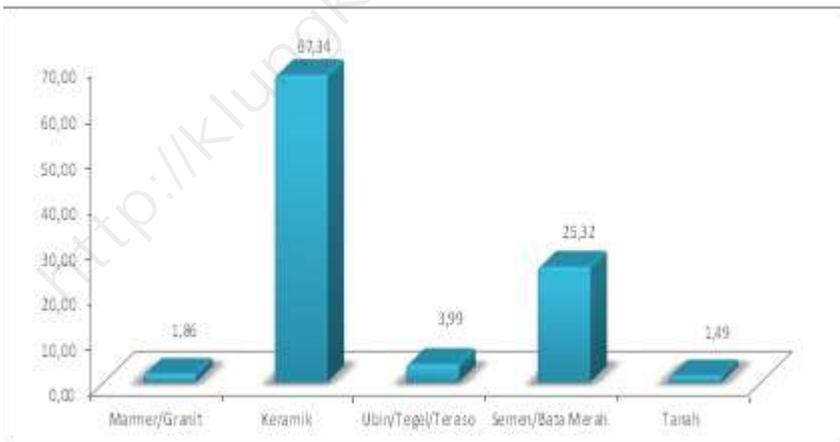
Gambar 7.4 Persentase Bangunan Tempat Tinggal Menurut Jenis Dinding Tembok Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Klungkung Tahun 2015



Sumber : Susenas 2015

Selain jenis atap dan dinding, jenis lantai juga dapat menjadi indikator penilaian rumah sehat. Lantai dari tanah dianggap kurang memenuhi standar kesehatan karena jika musim hujan akan menjadi lembab dan dapat menjadi media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti diare, cacingan, dan penyakit kulit. Begitu juga ketika musim panas, lantai tanah akan lebih banyak mengeluarkan debu, yang juga dapat menjadi media penyebaran penyakit. **Sebagian besar rumah tangga di Klungkung menempati rumah dengan jenis lantai utama terbuat dari keramik yaitu sebesar 67,34 persen, semen/bata merah sebesar 25,32 persen, lantai dari ubin/tegel/teraso sebesar 3,99 persen dan sisanya sebesar 1,86 persen dan 1,49 persen merupakan lantai dari marmer/granit dan lantai dari tanah.**

**Gambar 25 Persentase Rumah Tangga Menempati Jenis Lantai Utama
Menggunakan Berbagai Material di Kabupaten Klungkung Tahun 2015**



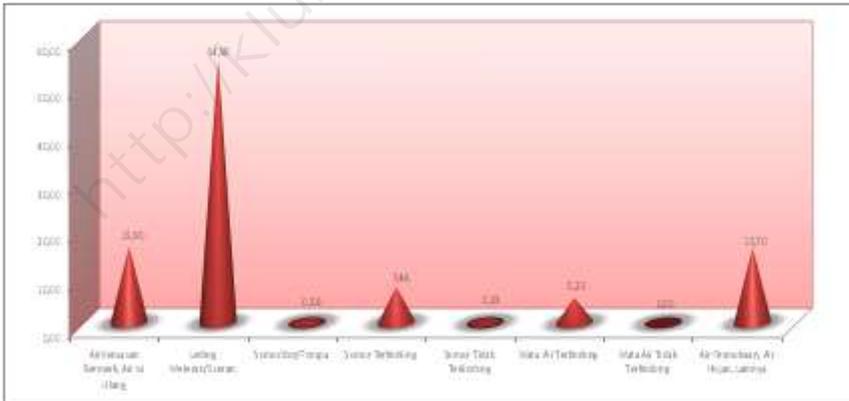
Sumber : Sensus 2015

7.2 Fasilitas Air Minum

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan nyaman tidaknya rumah tinggal tersebut. Salah satu fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya air bersih. Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan oleh pemerintah.

Air bersih adalah kebutuhan manusia yang paling dasar yang merupakan sumber kehidupan manusia. Ketiadaan air bersih akan memberi dampak paling signifikan pada kesehatan manusia karena dapat mengakibatkan berbagai penyakit, seperti diare dan cacingan. Ketersediaan air bersih di rumah tangga diukur dari sumber air minum yang digunakan dan jarak sumber air minum ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat.

Gambar 7.2 Sediaan Rumah Tangga Minum Berbasis Air Minum Kabupaten Klungkung Tahun 2015



Sumber air minum mempengaruhi kualitas air minum. Untuk sumber air minum yang berasal dari sumber air minum layak, konsep yang digunakan meliputi leding meteran, leding eceran, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Khusus untuk sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10 meter. Sementara itu, konsep air bersih meliputi air kemasan, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Hal yang sama untuk sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10 meter.

Hasil Susenas 2015 menunjukkan bahwa 82,51 persen rumah tangga di Klungkung telah menggunakan sumber air minum layak dan 82,70 persen telah menggunakan sumber air minum bersih. Sebesar 59,15 persen rumah tangga di Klungkung memperoleh air minum dengan cara langganan, 25,08 persen memperoleh air minum dengan cara tidak membeli dan sebesar 15,77 persen memperoleh air minum dengan cara membeli eceran. Disamping itu sebesar 62,50 persen rumah tangga di Klungkung menggunakan fasilitas air minum hanya untuk rumah tangganya saja, sedangkan sebesar 32,57 persen menggunakan fasilitas air minum secara bersama, sebesar 4,11 persen menggunakan fasilitas air minum umum dan sisanya sebesar 0,82 persen tidak menggunakan fasilitas air minum. Sebanyak 54,98 persen rumah tangga di Klungkung menggunakan leding meteran/eceran sebagai sumber air minumnya tetapi masih terdapat 15,70 persen rumah

tangga di Klungkung yang menggunakan air permukaan/air hujan sebagai sumber air minumannya, hal ini terjadi karena sebagian besar penduduk Nusa Penida masih menggunakan air hujan sebagai air minumannya, karena menurut masyarakat Nusa Penida rasa air hujan jauh lebih enak dibandingkan rasa air leding.

Gambar 7.7 Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Sumber Air Minum Utama ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Kabupaten Klungkung Tahun 2015



Sumber : Susenas 2015

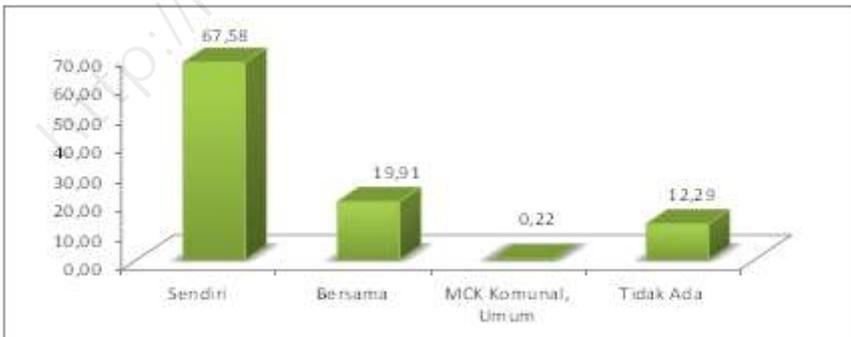
Kualitas sumber air minum juga sangat ditentukan oleh jarak sumber air minum dengan tempat penampungan kotoran/tinja, semakin jauh maka tingkat kontaminasi dari limbah kotoran akan semakin kecil. Jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran/tinja yang lebih dari 10 meter adalah 90,58 persen, sementara jaraknya yang kurang dari 10 meter hanya sebesar 5,42 persen. Jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran/tinja dianggap memenuhi syarat kesehatan jika jaraknya lebih dari 10 meter sehingga dapat disim-

pulkan bahwa penduduk Klungkung yang sumber air minumnya berasal dari sumur dan mata air yang kurang higienis adalah sebesar 5,42 persen.

7.3 Fasilitas Buang Air Besar

Fasilitas buang air besar (BAB) merupakan indikator lainnya apakah rumah tangga tersebut sudah berperilaku hidup sehat atau belum. Penduduk Klungkung pada Tahun 2015, fasilitas BAB untuk rumah tangga yang fasilitas sendiri menduduki urutan tertinggi yaitu 67,58 persen artinya bahwa 67,58 persen dari seluruh rumah tangga yang ada di Klungkung menggunakan fasilitas BAB nya terbatas pada rumah tangga sendiri. Sedangkan sebanyak 19,91 persen penggunaan fasilitas BAB nya bersama rumah tangga lainnya sementara yang menggunakan fasilitas BAB nya menggunakan fasilitas umum relatif kecil yaitu sekitar 0,22 persen, dan masih terdapat rumah tangga yang tidak menggunakan fasilitas buang air besar yaitu sebesar 12,29 persen.

Gambar 7.8 Persentase Rumah Tangga menurut Status Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Kabupaten Klungkung Tahun 2015

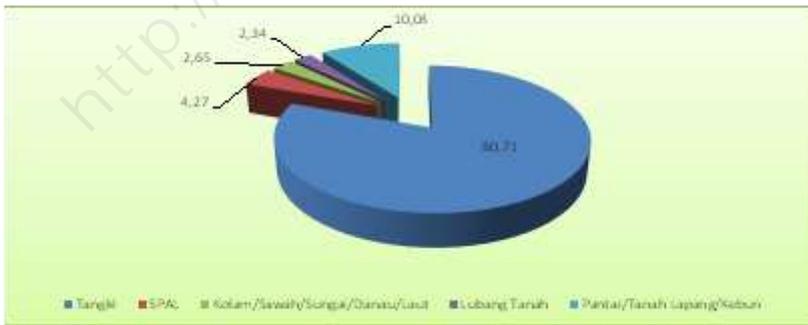


Sumber : Susenas 2015

Salah satu aspek penting dari fasilitas pembuangan air besar yang mempengaruhi baik buruknya sanitasi adalah jenis kloset. Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus yang dibedakan menjadi leher angsa, plengsengan, cemplung/cubluk, dan tidak memakai kloset. Berdasarkan hasil susenas 2015 diketahui bahwa 98,73 persen rumah tangga Klungkung menggunakan jamban jenis leher angsa sedangkan penggunaan kloset selain leher angsa hanya sebesar 1,02 persen untuk jenis kloset plengsengan dengan tutup dan 0,24 persen untuk jenis kloset plengsengan tanpa tutup.

Komponen lain yang penting dari fasilitas pembuangan air besar adalah tempat pembuangan akhir tinja. Beberapa jenis tempat pembuangan akhir tinja yaitu tangki, SPAL (Saluran Pembuangan Akhir Limbah), kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lainnya. Dari beberapa jenis tempat pembuangan tinja tersebut, tangki dan SPAL yang paling memenuhi standar kesehatan karena mengurangi tercemarnya sumber air minum rumah tangga dari resapan limbah tinja.

Gambar 7.9 Rincian Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Kabupaten Klungkung Tahun 2015



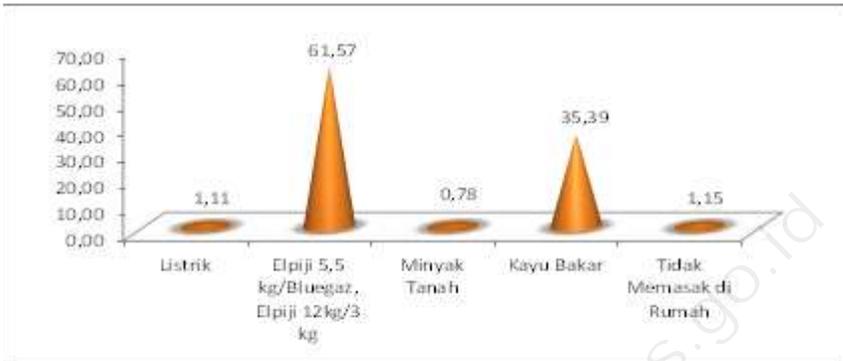
Sumber : Susenas 2015

Berdasarkan hasil susenas 2015 persentase rumah tangga di Klungkung yang menggunakan tangki dan SPAL sebagai tempat penampungan akhir tinja sangat dominan, yaitu sebesar 84,98 persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan selain tangki dan SPAL juga masih ada, seperti kolam/sawah/sungai/danau/ laut sebesar 2,65 persen, lubang tanah sebesar 2,34 persen, pantai/ tanah lapang/ kebun sebesar 10,03 persen. Masih tingginya persentase rumah tangga yang jambannya belum menggunakan tangki dan SPAL bisa menunjukkan perilaku tidak sehat masyarakat yang diakibatkan oleh keadaan ekonomi, keterbatasan akses/ketersediaan fasilitas, dan wawasan masyarakat itu sendiri.

7.4 Bahan Bakar Untuk Memasak

Sumber bahan bakar untuk memasak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber bahan bakar terbarukan dan sumber bahan bakar tak terbarukan. Sumber bahan bakar terbarukan contohnya adalah kayu bakar, sedangkan sumber bahan bakar tak terbarukan adalah LPG dan minyak tanah. Sumber bahan bakar untuk memasak dari kayu dianggap sebagai bahan bakar yang tidak ramah lingkungan karena menyebabkan polusi dan merusak ekologi apabila digunakan secara terus menerus tanpa dilakukan pelestarian lingkungan. Sumber bahan bakar memasak tak terbarukan, walaupun relatif tidak menimbulkan polusi dan lebih praktis digunakan tetapi ketersediannya yang sangat

Gambar 7.10 Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bakar Utama yang Digunakan untuk Memasak Kabupaten Klungkung Tahun 2015



Sumber : Susenas 2015

terbatas, sehingga apabila sudah habis, energi ini tidak akan dapat diperbarui kembali.

Berdasarkan hasil Susenas 2015, lebih dari separuh (61,57 persen) rumah tangga di Klungkung menggunakan LPG sebagai bahan bakar untuk memasak. Sementara itu, rumah tangga yang menggunakan kayu bakar untuk memasak sebesar 35,39 persen. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan listrik dan minyak tanah sebagai bahan bakar utama untuk memasak sebesar 1,11 persen dan 0,78 persen. Sedangkan sebesar 1,15 persen rumah tangga di Klungkung tidak memasak di rumah.

7.5 Sumber Penerangan

Sumber penerangan yang dicakup dalam publikasi ini adalah listrik dan bukan listrik. Listrik meliputi listrik yang bersumber dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) maupun non PLN. Listrik merupakan

sumber penerangan yang lebih baik dibandingkan dengan jenis penerangan lainnya. Hal ini disebabkan listrik lebih praktis dan modern, serta tidak menimbulkan polusi. Rumah tangga yang menggunakan listrik dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Berdasarkan gambar 7.11 terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga di Klungkung menggunakan Listrik PLN sebagai sumber utama penerangan yaitu sebesar 99,42 persen, sedangkan sebesar 0,25 persen rumah tangga menggunakan Listrik Non PLN dan sebesar 0,33 persen rumah tangga tidak menggunakan listrik sebagai sumber utama pen-

Gambar 7.11 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Utama Penerangan Kabupaten Klungkung Tahun 2015



Sumber : Susenas 2015

erangan rumah.

<http://klungkungkab.bps.go.id>

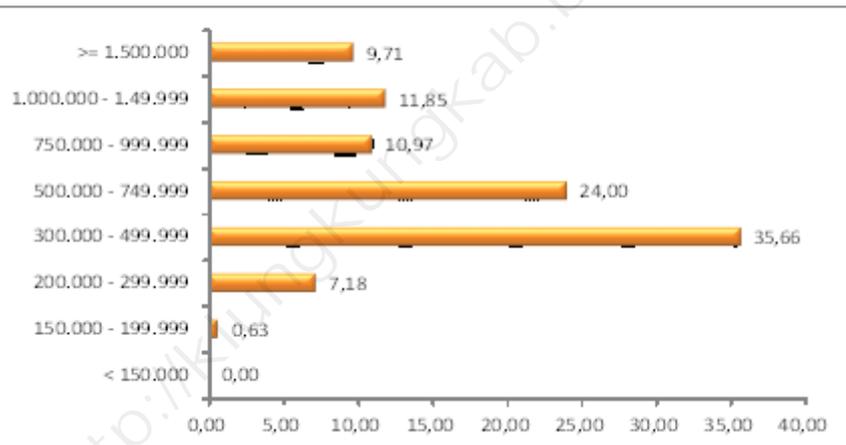
Consumption 2015



8.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rakyat dari sisi ekonomi. Namun kenyataan dilapangan, masyarakat pada umumnya masih sulit untuk memberikan data penerimaan/pendapatan secara riil, sehingga digunakan metode pendekatan yaitu dengan merinci besarnya pengeluaran rumah tangga baik pengeluaran untuk kebutuhan makanan maupun non makanan.

Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Selama Persebulan Kabupaten Klungkung Tahun 2015



Sumber : Susenas 2015

Distribusi penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan dapat menunjukkan besaran pengeluaran yang dikeluarkan oleh setiap penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada Tahun 2015 di Kabupaten Klungkung terdapat 35,66 persen dari total penduduk dengan tingkat pengeluaran selama sebulan Rp.300.000 -

Rp.499.999, 24,00 persen penduduk dengan tingkat pengeluaran Rp.500.000—Rp.749.999, sebanyak 10,97 persen penduduk dengan tingkat pengeluaran Rp.750.000—Rp.999.999, dan sebesar 11,85 persen penduduk dengan tingkat pengeluaran Rp.1.000.000—Rp.1.499.999, sedangkan sisanya sebesar 9,71 persen, 7,18 persen dan **0,63 persen merupakan penduduk dengan tingkat pengeluaran \geq Rp.1.500.000, Rp.200.000—Rp.299.999 dan Rp.150.000—Rp.199.999.** Dengan besarnya persentase penduduk di tingkat pengeluaran menengah berarti bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Klungkung memiliki pendapatan menengah.

8.2 Jenis Pengeluaran

Jenis pengeluaran perkapita dibedakan atas pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan. Pengeluaran makanan antara lain meliputi padi-padian, umbi-umbian, daging, makanan dan minuman jadi, tembakau dan lainnya. Pengeluaran non makanan antara lain meliputi perumahan dan fasilitas rumahtangga, aneka barang dan jasa, biaya pendidikan, biaya kesehatan, pakaian, pajak dan asuransi, keperluan pesta.

Proporsi pengeluaran makanan dan non makanan ini bisa dijadikan sebagai indikasi tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Jika seseorang (rumah tangga) mempunyai porsi pengeluaran makanan yang sangat besar maka ada indikasi bahwa seseorang (rumah tangga) tersebut tergolong miskin. Ini didukung oleh Engel, seorang pakar ekonomi internasional (Swedia), yang dirumuskan dalam Hukum Engel (Engel's

Law): persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Dengan kata lain, apabila rumah tangga mempunyai porsi pengeluaran untuk makanan yang sangat besar, berarti ada indikasi bahwa rumah tangga tersebut adalah rumah tangga miskin.

Gambar 8.2. Persentase Distribusi Konsumsi Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Klungkung Tahun 2015



Sumber : Susenas 2015

Dari Gambar 8.2, terlihat bahwa di Tahun 2015 jenis pengeluaran rumah tangga penduduk Kabupaten Klungkung lebih besar makanan daripada non makanan yaitu masing-masing sebesar 50,76 persen dan 49,24 persen.

<http://klungkungkab.bps.go.id>

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015



PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN

Ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli



IPM

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan



Catatan:
Sejak tahun 2014 terjadi perubahan metode penghitungan IPM



ANGKA HARAPAN HIDUP

Rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir



RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal



HARAPAN LAMA SEKOLAH

Lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk usia 7 tahun ke atas pada umur tertentu di masa datang



Pembangunan manusia senantiasa menjadi salah satu aspek utama perencanaan pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choice of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah **“perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut** (UNDP, 1990).

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 komponen utama, yaitu:

- a. Peningkatan produktivitas dan partisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah.
- b. Akses untuk memperoleh kesempatan yang adil.
- c. Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
- d. Pembangunan harus dilakukan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Angka IPM memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Atau dengan kata lain untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

IPM adalah suatu indikator pembangunan manusia yang diperkenalkan UNDP pada tahun 1990. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*a decent standard of living*).

Umur panjang dan hidup sehat dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir (e_0). Pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas. Standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang didasarkan pada paritas daya beli dalam rupiah (*purchasing power parity*).

9.1 Indikator Kesehatan

Indikator Kesehatan yang digunakan untuk pembentukan IPM adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu. Secara makro angka harapan hidup dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Peningkatan angka harapan hidup mengindikasikan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan. Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, angka harapan hidup

penduduk Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, harapan hidup penduduk Kabupaten Klungkung 69,45 tahun, pada tahun 2012 menjadi 69,66 tahun, pada tahun 2013 menjadi 69,84 tahun, tahun 2014 menjadi 69,91 tahun dan tahun 2015 menjadi 70,11 tahun . Angka ini berada dibawah rata-rata harapan hidup Provinsi Bali yaitu 71,35 tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk pemberantasan kemiskinan.

Tabel 9.1
Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2011-2015

No	Kab/Kota	AHH					Rank 2015
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jembrana	70,92	71,09	71,26	71,39	71,43	5
2	Tabanan	72,18	72,35	72,52	72,64	72,74	4
3	Badung	73,91	74,05	74,19	74,30	74,31	1
4	Gianyar	72,43	72,57	72,71	72,78	72,84	3
5	Klungkung	69,45	69,66	69,84	69,91	70,11	7
6	Bangli	68,98	69,18	69,36	69,44	69,54	8
7	Karangasem	68,76	68,96	69,12	69,18	69,48	9
8	Buleleng	70,23	70,41	70,58	70,71	70,81	6
9	Kota Denpasar	73,34	73,44	73,56	73,71	73,91	2
BALI		70,78	70,94	71,11	71,20	71,35	

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Indeks Pembangunan Manusia, 2011–2015)

9.2 Indikator Pendidikan

Indikator pendidikan merupakan indeks komposit antara angka harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah.

9.2.1 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Tabel 9.2
Harapan Lama Sekolah
Penduduk Usia 7 Tahun Keatas
di Kabupaten Klungkung, 2011 - 2015

Tahun	Harapan Lama Sekolah
2011	12,17
2012	12,30
2013	12,43
2014	12,57
2015	12,85

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung
(Indeks Pembangunan Manusia, 2011-2015)

Angka harapan Lama Sekolah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, pada tahun 2011 angka harapan lama sekolah sebesar 12,17 tahun, pada tahun 2012 menjadi 12,30 tahun, pada tahun 2013 dan 2014 menjadi 12,43 tahun dan 12,57 tahun. Pada tahun 2015 angka harapan lama sekolah kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 12,85 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang sudah membuahkan hasil yang positif.

9.2.2 Rata—Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata—Rata Lama Sekolah (RLS) dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Tabel 9.3
Rata-rata Lama Sekolah
Penduduk Usia 25 Tahun Keatas
di Kabupaten Klungkung Tahun 2011 - 2015

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah
2011	6,68
2012	6,81
2013	6,88
2014	6,90
2015	6,98

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung
 (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional)

Seperti halnya angka harapan lama sekolah, dibandingkan dengan tahun 2011 rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan, namun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah 6,68 tahun , pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah 6,81 tahun dan pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah menjadi 6,88 tahun sedangkan pada tahun 2014 rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan menjadi 6,90 tahun dan meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 6,98 tahun. Ini berarti hingga tahun

2015 rata-rata penduduk Kabupaten Klungkung hanya mengenyam pendidikan formal kurang lebih sampai tahun pertama SMP. Angka ini masih dibawah angka rata-rata lama sekolah propinsi Bali yang berada pada angka 8,26 tahun.

9.3 Indikator Pendapatan

Kemampuan ekonomi penduduk tercermin dari tingkat pendapatan yang diperoleh. Tetapi pada prakteknya pengumpulan data pendapatan sulit dilakukan sehingga digunakan data pengeluaran sebagai pendekatan. Data pengeluaran mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa, makanan maupun non-makanan. Namun demikian, nilai nominal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi suatu daerah. Oleh karena itu dalam penghitungan IPM nilai pengeluaran perkapita dikoreksi dengan inflasi dan paritas daya beli sehingga diperoleh suatu indikator tingkat kesejahteraan yang memiliki keterbandingan antar tempat dan waktu. Sehingga dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak membaiknya ekonomi.

Pada tahun 2015, pengeluaran perkapita Kabupaten Klungkung mencapai Rp. 10.711.000 per tahun atau sebesar Rp. 892.583,33 per bulan, lebih rendah jika dibandingkan dengan pengeluaran perkapita Propinsi Bali yang sebesar Rp. 13.078.000 per tahun atau sebesar Rp. 1.089.833,33 per bulan. Pengeluaran perkapita dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan walaupun tidak besar. Pada tahun 2014 pengeluaran perkapita Kabupaten Klungkung mencapai Rp. 10.501.000 atau sebesar Rp. 875.083,33 per bulan. Pada

tahun 2013 pengeluaran perkapita Kabupaten Klungkung mencapai Rp. 10.488.000 per tahun atau sebesar Rp. 874.000 per bulan. Pada tahun 2012 pengeluaran perkapita Kabupaten Klungkung mencapai Rp. 10.358.000 per tahun atau sebesar Rp. 863.166,67 per bulan, sedangkan pada tahun 2011 pengeluaran perkapita Kabupaten Klungkung berada pada kisaran Rp. 10.129.000 per tahun atau sebesar Rp. 844.083,33 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun daya beli masyarakat Kabupaten Klungkung semakin meningkat. Bila dibandingkan dengan pengeluaran perkapita kabupaten lain, pengeluaran perkapita Kabupaten Klungkung menempati peringkat ke 7 dari 9 kabupaten/kota di Propinsi Bali, dibawah kabupaten Jembrana dan diatas Kabupaten Bangli.

Tabel 9.4
Rata - rata Pengeluaran yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Bali, 2011-2015 (Rp.000,-)

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Jembrana	10.499	10.676	10.890	10.944	11.168
Tabanan	13.056	13.266	13.438	13.492	13.665
Badung	15.508	15.795	16.025	16.080	16.409
Gianyar	12.761	13.031	13.318	13.382	13.578
Klungkung	10.129	10.358	10.488	10.501	10.711
Bangli	10.113	10.341	10.424	10.469	10.649
Karangasem	9.058	9.128	9.341	9.402	9.556
Buleleng	11.693	11.946	12.187	12.249	12.587
Denpasar	17.944	18.227	18.532	18.609	18.849
Bali	12.307	12.530	12.738	12.831	13.078

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia, 2011-2015

9.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia atau biasa disebut dengan IPM adalah indek yang mengukur hasil pencapaian pembangunan manusia dari suatu daerah/wilayah berdasarkan tiga dimensi pembangunan.

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Angka IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah daerah adalah daerah maju, daerah berkembang, atau daerah terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Tabel 9.5
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2011-2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Jembrana	67,53	67,94	68,39	68,67	69,66
Tabanan	71,35	71,69	72,31	72,68	73,54
Badung	76,66	77,26	77,63	77,89	78,86
Gianyar	72,50	73,36	74,00	74,29	75,03
Klungkung	67,01	67,64	68,08	68,30	68,98
Bangli	63,87	64,53	65,47	65,75	66,24
Karangasem	61,60	62,95	63,70	64,01	64,68
Buleleng	67,73	68,29	68,83	69,16	70,03
Denpasar	79,77	80,45	81,32	81,65	82,24
Bali	70,87	71,62	72,09	72,48	73,27

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia, 2011-2015

Berdasarkan tabel 9.5 terlihat bahwa dari tahun ke tahun IPM Kabupaten Klungkung selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Klungkung semakin baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 IPM Kabupaten Klungkung sebesar 67,01 dan pada tahun 2015 IPM Kabupaten Klungkung telah meningkat menjadi 68,98, tetapi walaupun IPM Kabupaten Klungkung terus meningkat dari tahun ke tahun tetapi masih dibawah IPM Provinsi Bali (73,27 persen) dan jika dibandingkan dengan 9 kabupaten/kota di bali, IPM Kabupaten Klungkung berada pada peringkat 7 dibawah Kabupaten Jembrana dan diatas Kabupaten Bangli.

<http://klungkungkab.bps.go.id>

KEMISKINAN KLUNGKUNG

2015

Garis
Kemiskinan
(per kapita per bulan)
Rp264.866

Penjumlahan garis kemiskinan makanan dan non makanan

P1
Indeks
Kedalaman
Kemiskinan
1,00

Rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan

Jumlah Penduduk
Miskin (ribu jiwa)
12,11

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan

Persentase
Penduduk Miskin
6,91%

TURUN 0,1 poin
dibandingkan
tahun 2014

Persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan

P2
Indeks
Keparahan
Kemiskinan
0,22

Gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Indonesia dan beberapa negara lainnya mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*cost of basic needs*). Dengan kata lain kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Dengan pendekatan ini, penduduk miskin dapat didefinisikan sebagai penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kkal per kapita per hari serta kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Garis kemiskinan Kabupaten Klungkung yang terus meningkat dari tahun ke tahun akibat peningkatan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar, ternyata tidak serta merta menyebabkan peningkatan persentase penduduk miskin. Hal ini terlihat dari berfluktuasinya besaran persentase penduduk miskin dari tahun 2014 hingga 2015.

10.1 Indikator Kemiskinan

Berdasarkan Tabel 10.1 terlihat bahwa garis kemiskinan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,39 persen dari garis kemiskinan tahun 2014. Persentase Penduduk Miskin atau yang biasa disebut dengan PO adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. PO tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,10 persen. Kedalaman Kemiskinan atau yang biasa disebut P1 adalah ukuran rata—rata kesenjangan pengeluaran masing—masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2015 P1 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan P1 pada tahun 2014. Keparahan Kemiskinan atau yang biasa disebut P2 adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2015 P2 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan P2 pada tahun 2014. Penurunan ini menunjukkan makin homogenya pengeluaran antara penduduk miskin.

Tabel 10.1
Indikator Kemiskinan Kabupaten Klungkung, 2014 - 2015

Indikator Kemiskinan	2014	2015
Garis Kemiskinan	253.717	264.866
Persentase Penduduk Miskin (PO)	7,01	6,91
Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,32	1,00
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,36	0,22

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung

10.2 Distribusi Pendapatan

Distribusi Pendapatan adalah ketimpangan atau ketidakmeratanya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya.

Ada beberapa cara untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan antara lain dengan :

1. Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat besarnya kontribusi 40% penduduk termiskin.

Kriteria Ketimpangan Distribusi Pendapatan Menurut Bank Dunia

Distribusi Pendapatan	Tingkat Ketimpangan
Kelompok 40% termiskin pengeluarannya < 12% dari keseluruhan pengeluaran	Tinggi
Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12% - 17% dari keseluruhan pengeluaran	Sedang
Kelompok 40% termiskin pengeluarannya > 17% dari keseluruhan pengeluaran	Rendah

2. Koefisien Gini (Gini Ratio)

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien gini diperoleh

dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dari kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang dimana kurva Lorenz itu berada.

Ketimpangan Distribusi Pendapatan Berdasarkan Koefisien Gini

Nilai Koefisien Gini	Tingkat Ketimpangan
.... < 0,4	Rendah
0,4 - 0,5	Sedang
.... > 0,5	Tinggi

Berdasarkan hasil Susenas 2015 dapat diketahui nilai Distribusi Pendapatan untuk masing—masing golongan pendapatan. Dari Tabel 10.2 terlihat bahwa distribusi pendapatan untuk golongan pendapatan masyarakat 40% bawah adalah sebesar 19,54 persen. Jika dilihat berdasarkan kriteria bank dunia maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di masyarakat Kabupaten Klungkung rendah atau dengan kata lain bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Klungkung hampir merata. Dari Tabel 10.3 terlihat bahwa gini ratio Kabupaten Klungkung dari tahun 2011—2015 mengalami fluktuasi, gini ratio Kabupaten Klungkung tahun 2015 sebesar 0,3695 yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan di masyarakat Kabupaten Klungkung termasuk ketimpangan rendah, hal ini sejalan dengan hasil penghitungan distribusi pendapatan berdasarkan kriteria bank dunia.

Tabel 10.2
Distribusi Pendapatan
Kabupaten Klungkung, 2015

Golongan Pendapatan Masyarakat	Disribusi Pendapatan
40 % Bawah	19,54
40 % Sedang	34,64
20 % Tinggi	45,82

Sumber : Susenas 2015

Tabel 10.3
Gini Ratio Kabupaten Klungkung, 2011-2015

Tahun	Gini Ratio
2011	0,3777
2012	0,3473
2013	0,3599
2014	0,3543
2015	0,3695

Sumber : Susenas 2015

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— Enlighten The Nation —



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KLUNGKUNG**

Jl. Raya Besakih, Desa Akah
Kecamatan Klungkung 80751
Telp: (0386)21180, Fax: (0386)24242
Homepage: <http://klungkungkab.bps.go.id>
E-mail: bps5105@bps.go.id

